Kabupaten Pamekasan

RENCANA STRATEGIS

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN PAMEKASAN

TAHUN 2025 – 2029

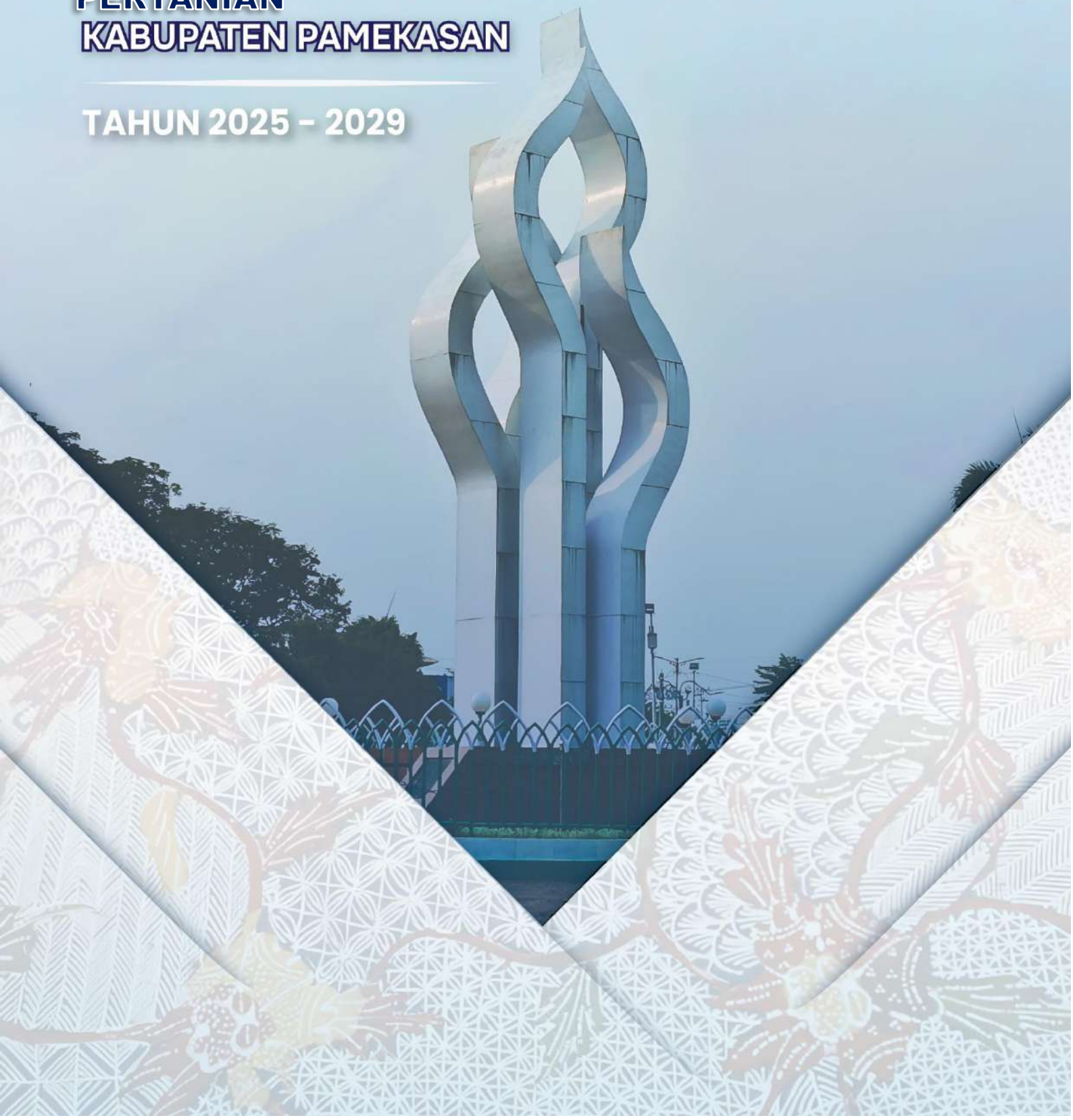

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Tahun 2025-2029 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 3 (tiga) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025- 2029 Kabupaten Pamekasan dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan BAPPERIDA dan pemangku kepentingan terkait. Penyusunan dokumen Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2025-2029 dilakukan karena adanya transisi pada Kepala Daerah dan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029.

Pamekasan, Oktober 2025
Plt.Kepala Dinas Ketahanan Pangan
dan Pertanian Kabupaten Pamekasan

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Ir. Indah Kurnia Sulistiorini, S.Pt., M.M
Pembina
NIP. 19711217 199803 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv
BAB 1. PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 2
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 6
BAB 2. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 9
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 9
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 9
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 19
BAB 3. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 39
3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029 39
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029 44
BAB 4. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN SASARAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 55
4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rencana Strategis Perangkat Daerah 55
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 99
BAB 5. PENUTUP 102
5.1 Pedoman Transisi 102
5.2 Kaidah Pelaksanaan 102
5.3 Penutup 104
LAMPIRAN 105

DAFTAR TABEL

Tabel 2 .1 Jumlah Asset yang Dimiliki dan Jumlah Asset yang Tidak Dipakai (Rp) 15
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan 16
Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan 18
Tabel 2.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 20
Tabel 2.5 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran di RPJMD 22
Tabel 2.6 Pemetaan Telaah Renstra K/L Renstra Provinsi 25
Tabel 2.7 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW 28
Tabel 2.8 Faktor Pendorong dan Penghambat ditinjau dari Implikasi KLHS 30
Tabel 2.9 Telaah Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah 31
Tabel 2.10 Isu Strategis 35
Tabel 31 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2025-2029 40
Tabel 3.2 Penyusunan Strategi dan Arah Kebijakan 45
Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 47
Tabel 3.4 Linearitas Operasionalisasi NSPK dan arah kebijakan RPJMD dengan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan 50
Tabel 3.5 Matriks Arah Kebijakan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan 53
Tabel 3.6 Integrasi Janji Politik 54
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD 56
Tabel 4.2 Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan 74
Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 97
Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 99
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 100

Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 97
Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 99

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Menurut SPPN dan UU Keuangan Negara 1
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 13
Gambar 2.2 Pohon Masalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan 34
Gambar 3.1 Cascading Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.....43
Gambar 3.2 Crosscutting Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 44

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD 56
Tabel 4.2 Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan..... 74
Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah..... 97
Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 99
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 100

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. Pohon Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian..... 105
LAMPIRAN 2. Indikator Kinerja Utama 106
LAMPIRAN 3. Definisi Operasional Variabel Program/Kegiatan..... 110

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

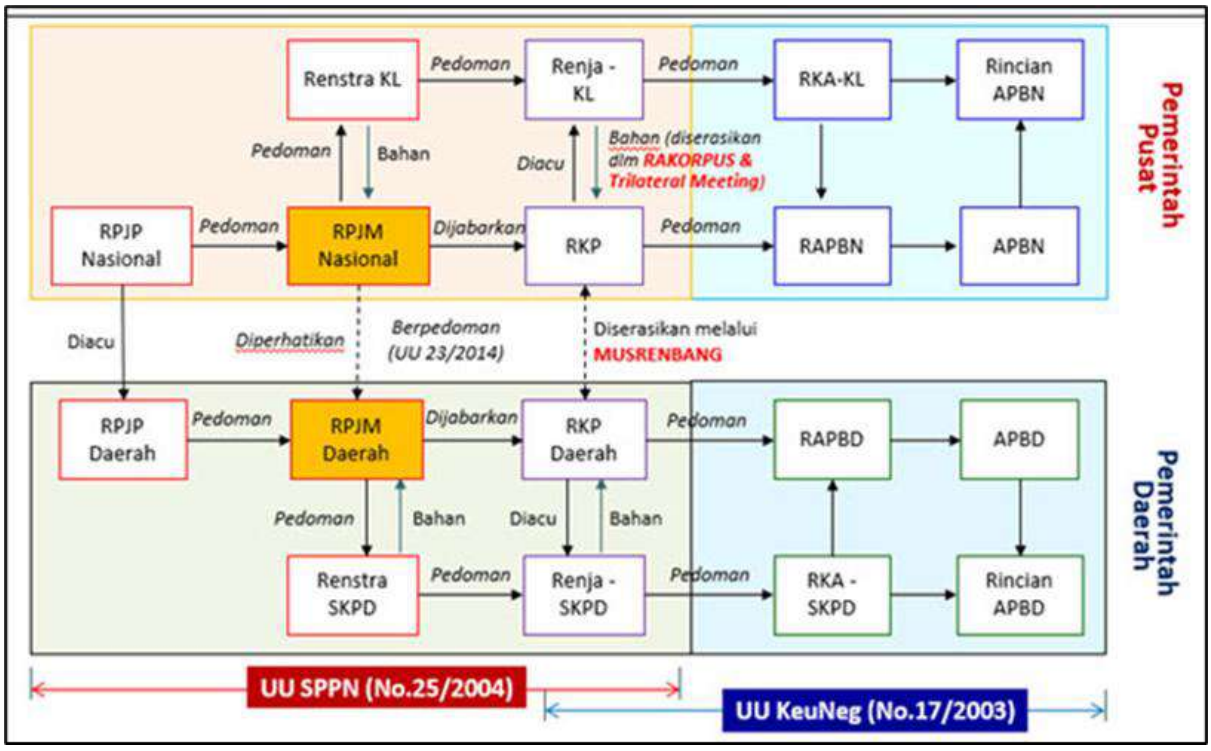

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Menurut SPPN dan UU Keuangan Negara

Rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan pada masa kepemimpinan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan. Untuk itu Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program tahun 2025-2029 yang dituangkan ke dalam kebijakan, strategi, dan program perencanaan pembangunan. Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten

Pamekasan mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Pamekasan serta sejumlah dokumen terkait, seperti RTRW, Renstra Provinsi dan Renstra Kementerian/Lembaga serta sejumlah dokumen perencanaan lainnya.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu tiga tahun. Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkonstribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Pamekasan berkaitan dengan pembangunan Kabupaten Pamekasan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Dalam menyusun Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Pamekasan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara

Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2024-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 127);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2023-2043;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor .... Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026;
26. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu tiga tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu tiga tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna

mendukung dan memenuhi tujuan dan sasaran untuk kurun waktu satu sampai tiga tahun kedepan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 3 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggun g jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tiga tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung tujuan dan sasaran kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun tiga tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tiga tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 berupa Gambaran kondisi mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi dan nilai strategis Renstra PD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Menguraikan tugas, fungsi, struktur dan sumber daya perangkat daerah serta menguraikan kinerja pelayanan perangkat daerah dengan menyajikan data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah disertai hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Menguraikan pokok permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah serta mengidentifikasi isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan beserta indikator kinerjanya.

3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 2025-2029

Menguraikan tujuan dan sasaran perangkat daerah ditetapkan dengan memperhatikan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya. Mempertimbangkan kondisi Perangkat Daerahb yang ada saat ini, direkomendasikan agar Renstra Perangkat Daerah memiliki 1 (satu) tujuan.

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah 2025-2029

Menjelaskan strategi yang merupakan rencana Tindakan komprehensif yang berisikan Langkah-langkah dalam Upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

Program, kegiatan, sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output. Program, kegiatan, dan sub kegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri beserta pemutakhirannya. Daftar program, kegiatan, sub kegiatan dalam mencapai kinerja perangkat daerah dimulai dari tahun 2025-2029 sehingga diperlukan pernyataan secara eksplisit untuk menjelaskan program tahun 2029.

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menguraikan pengantar yang menjelaskan mengenai perumusan target keberhasilan pencapaian tujuan, dan sasaran Renstra Perangkat Daerah dan matriks/table Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah serta table Indikator Kinerja Kunci.

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB 2. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, maka Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian serta tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
d. Pengarahan dan pemanfaatan hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang ketahanan pangan dan pertanian;
e. Pemberian rekomendasi perizinan bidang ketahanan pangan dan pertanian;
f. Penilaian kinerja bawahan;
g. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah sebagai berikut:

1. Kepala dinas
2. Sekretariat, membawahi:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Kelompok Jabatan Fungsional;

3. Bidang Prasarana Pertanian, membawahi:
   a. Kelompok Jabatan Fungsional;
   b. Kelompok Jabatan Fungsional;
   c. Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Produksi Pertanian, membawahi:
   a. Kelompok Jabatan Fungsional;
   b. Kelompok Jabatan Fungsional;
   c. Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Produksi Peternakan, membawahi:
   a. Kelompok Jabatan Fungsional;
   b. Kelompok Jabatan Fungsional;
   c. Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Bidang Perizinan dan Penyuluhan, membawahi:
   a. Kelompok Jabatan Fungsional;
   b. Kelompok Jabatan Fungsional;
   c. Kelompok Jabatan Fungsional;
7. Bidang Kesehatan Hewan, membawahi:
   a. Kelompok Jabatan Fungsional;
   b. Kelompok Jabatan Fungsional;
   c. Kelompok Jabatan Fungsional;
8. Bidang Ketahanan Pangan, membawahi:
   a. Kelompok Jabatan Fungsional;
   b. Kelompok Jabatan Fungsional;
   c. Kelompok Jabatan Fungsional;
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sesuai ayat 5 mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian, Kepala Dinas juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sesuai ayat 6 sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
d. Pengarahan dan pemanfaatan hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang ketahanan pangan dan pertanian;
e. Pemberian rekomendasi perizinan bidang ketahanan pangan dan pertanian;
f. Penilaian kinerja bawahan;
g. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan *asset*, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 7. mempunyai fungsi:

a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan/asset, kearsipan dan perpustakaan Dinas;
c. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat, dan keprotokolan;
d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran, dan perundang – undangan;
e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi organisasi dan tata laksana, serta program kegiatan Dinas;
f. Pelaporan kinerja dan keuangan Dinas;
g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan implementasi Sistem Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi antar Bidang;

h. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pelayanan publik antar Bidang;
i. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan evaluasi kelembagaan antar Bidang;
j. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas antar Bidang;
k. Penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan, kinerja keuangan dan capaian reformasi birokrasi Dinas:
l. Penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Sekretariat;
m. Penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan, serapan anggaran dan capaian reformasi birokrasi Sekretariat;
n. Penilaian kinerja bawahan;
o. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang dan Kepala Seksi

Adapun Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan sebagimana Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

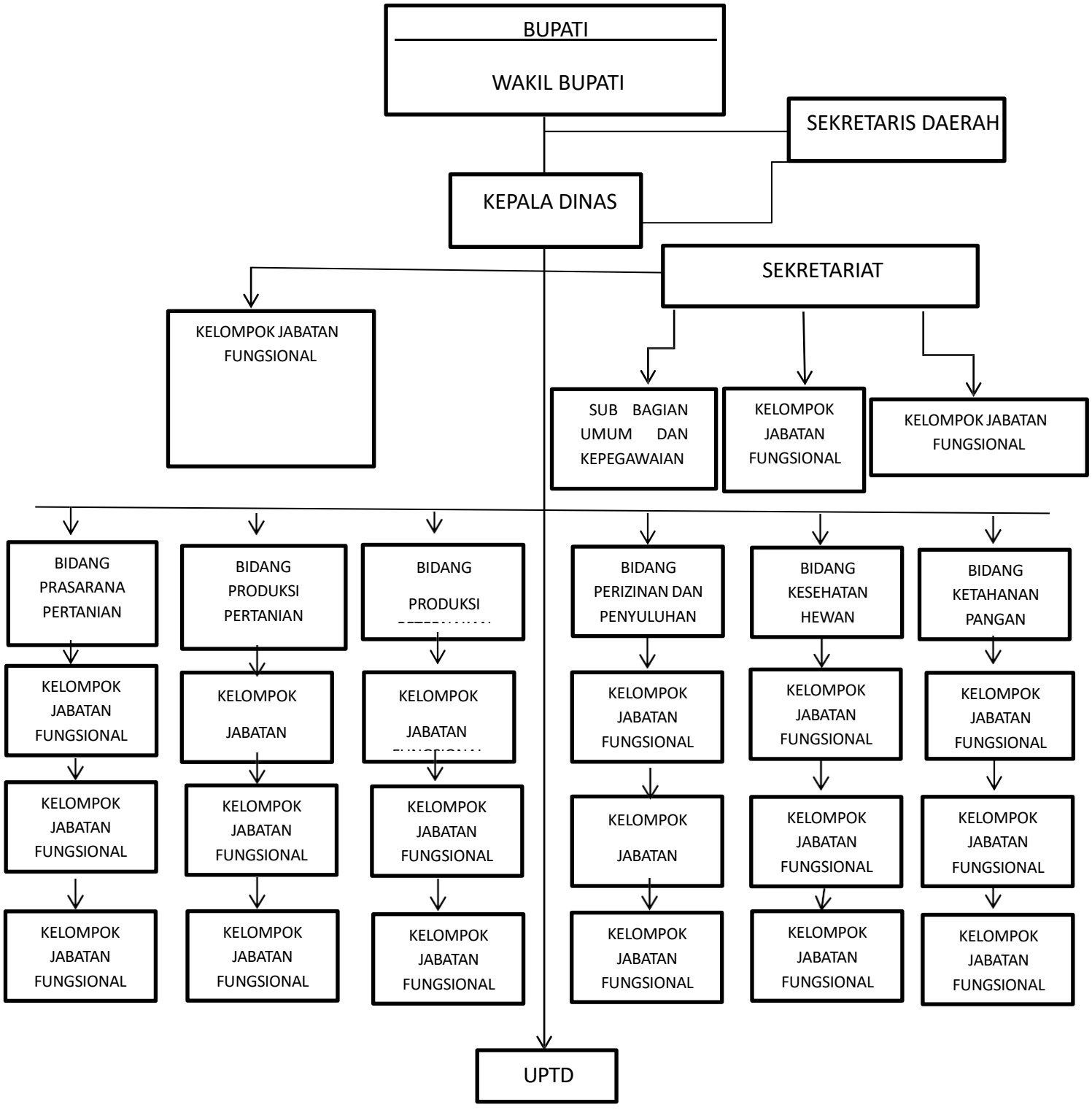

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pelaksanaan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efesien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasional maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sesuai struktur organisasi terdiri dari satu sekretariat dan enam bidang. Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan sebanyak 177 Orang, yang terdiri dari:

1. Eselon II : -
2. Eselon III : 5 orang
3. Eselon IV : 1 orang
4. Pejabat Fungsional : 123 orang
5. Staf/Non Eselon : 48 orang

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebanyak 182 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

1. Sarjana S-2 : 26 orang
2. Sarjana S-1 : 119 orang
3. Diploma -3 : 8 orang
4. SLTA : 23 orang
5. SLTP : -
6. SD : 1 orang

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2 .1 Jumlah Asset yang Dimiliki dan Jumlah Asset yang Tidak Dipakai (Rp)

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset yang Tidak Terpakai (RP)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1.	Tanah	26	7.541.787.500	Tanah	-	-	-
2.	Gedung dan bangunan	22	4.628.448.640	RPH, Kantor, Rumah sakit hewan	-	-	-
3.	Alat dan Mesin	269	3.676.598.558	Sepeda motor, mobil, alat kantor, alat laboratorium	-	-	-

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang diatur dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian maka Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SDGS (V)	Target IKK/IKU (V)	Target Indikator SPM /NSPK/LPPD (V)	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					Tahun					Tahun					Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Skor Pola Pangan Harapan	-	✓	-	65,4	71,2	71,2	72,3	72	65,4	67,4	71,7	71,9	71,2	100	94	101	99	98
2.	PDRB sub sektor pertanian dan peternakan	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Total produksi tanaman pangan	-	✓	-	257.207	211.000	211.000	212.500	203.949	230.092	209.853	329.848	205.002	296.396	89	99	156	96	145
4.	Total produksi tanaman Hortikultura	-	✓	-	77.349	79.294	79.294	81.288	60.419	65.525	62.916	99.282	119.713	114.818	85	79	125	147	190
5.	Total produksi tanaman perkebunan	-	✓	-	20.217	20.725	20.725	21.248	17.293	25.594	19.000	17.129	22.289	8.576	127	92	83	105	50
6.	Angka kecukupan gizi	-	✓	-	1.878	1.915	1.787	1.953	1.990	1.917	1.878	1.788	1.896	1.789	102	98	100	97	90
7.	Total prasarana pertanian	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Total prasarana kemandirian pangan	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan

Berdasarkan Tabel 2.2 diatas, indikator terkait skor pola pangan harapan mengalami fluktuasi, hal ini dikarenakan pola konsumsi mayarakat kurang beragam. Mindset masyarakat masih menganggap bahwa konsumsi pokok adalah beras. Padahal karbohidrat dapat diperoleh melalui bahan pangan pokok lokal lainnya seperti jagung, ubi atau ketela dan lainnya. serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan bergizi dan seimbang. Indikator terkait produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan memang fluktuatif. Banyak faktor yang memengaruhinya, seperti iklim dan konsumsi masyarakat.

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan

No	Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun ke-					Tahun ke-					Tahun ke-						
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rp17.161.901.989	Rp17.161.901.989	Rp18.339.155.325	Rp19.027.831.870		Rp12.771.662.533	Rp12.771.662.533	Rp17.335.001.864	Rp18.851.527.121		74	74	95	99	Rp17.922.697.793	Rp15.432.463.513
2.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Rp90.000.000,00	Rp90.000.000	Rp225.000.000	Rp250.000.000		Rp88.765.000	Rp88.765.000	Rp206.976.000	Rp245.375.440		99	99	92	98	Rp163.750.000	Rp157.470.360
3.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		-	-	Rp49.999.890	Rp196.450.500		-	-	Rp49.999.890	Rp189.790.500		-	-	100	97	Rp61.612.598	Rp59.947.598
4.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		Rp55.000.000	Rp55.000.000	-	-		Rp54.465.000	Rp54.465.000	-	-		99	99	-	-	Rp27.500.000	Rp27.232.500
5.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Rp14.642.645.850	Rp14.642.645.850	Rp7.748.675.300	Rp7.298.044.782		Rp12.930.991.600	Rp12.930.991.600	Rp7.528.283.871	Rp6.680.995.631		88	88	97	92	Rp11.083.002.946	Rp10.017.815.676
6.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	N/A	Rp11.595.146.867	Rp11.595.146.867	Rp33.721.500.000	Rp14.095.792.770	N/A	Rp11.209.851.935	Rp11.209.851.935	Rp33.107.631.655	Rp12.639.385.100	N/A	97	97	98	90	Rp17.751.896.626	Rp17.041.680.156
7.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Rp504.999.760	Rp504.999.760	Rp752.298.831	Rp206.304.807		Rp499.999.760	Rp499.999.760	Rp748.427.337	Rp191.884.987		99	99	99	93	Rp492.150.790	Rp485.077.961
8.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Rp30.000.000	Rp30.000.000	Rp10.000.000	Rp25.000.000		Rp29.981.000	Rp29.981.000	Rp3.852.000	Rp15.339.200		100	100	39	61	Rp23.750.000	Rp19.788.300
9.	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		Rp20.000.000	Rp20.000.000	Rp20.000.000	Rp5.000.000		Rp16.410.700	Rp16.410.700	Rp19.450.000	Rp4.659.000		82	82	97	93	Rp16.250.000	Rp14.232.600
10	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Rp243.250.000	Rp243.250.000	Rp299.500.000	Rp299.999.950		Rp165.261.500	Rp165.261.500	Rp275.901.785	Rp239.624.950		68	68	92	80	Rp271.499.988	Rp211.512.434

Berdasarkan tabel diatas, anggaran dan realisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan mengalami perubahan setiap tahunnya. Rasio antara anggaran dengan realisasi setiap tahunnya hampir seluruhnya terserap. Hal ini menandakan bahwa perencanaan anggaran, regulasi anggaran, sumber daya manusia serta pengadaan barang dan jasa terhadap program berjalan dengan baik. Rata-rata pertumbuhan anggaran dengan realisasi setiap tahunnya mengalami kenaikan meskipun tidak signifikan. Naiknya besaran anggaran ini selaras dengan arah tujuan dan sasaran kinerja, akan tetapi, belum bisa mengoptimalkan di sasraan kenaikan produksi pertanian. Anggaran tersebut masih bertumpu di pembangunan infrastruktur sektor pertanian, sedangkan di sektor produktivitas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan masih belum optimal.

2.1.4 Kelompok Ssaran Layanan Perangkat Daerah

Setiap layanan pemerintah wajib melaksanakan layanan baik kepada masyarakat maupun kepada stakeholders terkait. Kelompok sasaran layanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah sebagai berikut:

1. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian layanan:
   a. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan yang berperan sebagai mitra dalam pelaporan data statistik
2. Kelompok Sasaran Perangkat Daerah:
   a. Petani/Peternak/Kelompok Tani yang berperan sebagai objek penerima manfaat kegiatan di sektor pertanian, peternakan dan perkebunan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, maka Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Sebagaimana

tugas dan kewenangan tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan memiliki fungsi untuk menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;

a. Perumusan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
c. Pengarahan dan pemanfaatan hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja peyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang ketahanan pangan dan pertanian;
d. Pemberian rekomendasi perizinan bidang ketahanan pangan dan pertanian;
e. Penilaian kinerja bawahan;
f. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Permasalahan yang menjadi urusan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam melaksanakan fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindung, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat adalah berikut:

Tabel 2.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Permasalahan	Faktor-Faktor yang Memengaruhi	
		Internal	Eksternal
1.	Belum optimalnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Belum optimalnya transfer knowledge perihal budidaya tanaman	Anomali cuaca dan iklim
		sarana dan prasarana penyuluh yang belum memadai	Adanya degradasi lahan
			Kualitas tanah menurun
2.	Rendahnyakeanekaragaman konsumsi pangan masyarakat	Belum optimalnya sosialisasi tentang pemanfaatan pekarangan rumah	Kurangnya Pola pikir masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan
			Konsumsi buah dan sayur kurang

No	Permasalahan	Faktor-Faktor yang Memengaruhi	
		Internal	Eksternal
			Pemanfaatan pekarangan rumah yang belum optimal
3.	Produktivitas Ternak masih rendah	Sumberdaya petugas yang belum memadai	Pemanfaatan teknologi masih rendah
		Kebijakan dan regulasi	Sistem pemasaran masih tradisional
		Sarana dan prasarana terbatas	Kondisi iklim dan cuaca
		Ketersediaan lahan yang terbatas	Keterbatasan sumber daya alam
		Kurangnya pengetahuan pengelolaan pakan	Fluktuasi harga bahan pakan
		Rendahnya produktivitas budidaya HPT	Lalu lintas ternak yang belum terkontrol dengan baik
		Koordinasi lintas sektor masih rendah	

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan memiliki keterkaitan dengan Tujuan ke 4 sasaran ke 1 dari RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan berperan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi inklusif berbasis potensi dan keunggulan lokal. Oleh karena itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan perlu mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelayanan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran di RPJMD

Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang Memengaruhi	
				Pendukung	Penghambat
Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	**Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal, Pengentasan Kemiskinan, dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat**	**PDRB sektor pertanian dan peternakan**	Belum optimalnya PDRB sektor pertanian dan peternakan	iklim, kondisi tanah yang subur, serta potensi sumber daya manusia dan alam yang kurang optimal	alih fungsi lahan, keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya adopsi teknologi, perubahan iklim, serta masalah pemasaran dan logistik
	Meningkatnya produksi sumberdaya sektor pertanian dan peternakan	Total Produksi Tanaman Pangan	Rendahnya produktivitas tanaman pangan	Komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan ketahanan pangan	Anomali iklim
					Harga pasar yang tidak stabil
					Teknik budidaya yang kurang tepat
					Kurangnya minat menjadi petani muda
					Adanya degradasi lahan
		Total Produksi Hortikultura	Rendahnya produktivitas tanaman hortikultura	Sumber daya alam yang medukung produksi tanaman hortikultura	Anomali iklim
					Harga pasar yang tidak stabil
					Teknik budidaya yang kurang tepat

Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang Memengaruhi	
				Pendukung	Penghambat
					Kurangnya minat menjadi petani muda
					Adanya degradasi lahan
		Total Produksi Perkebunan	Rendahnya produktivitas tanaman perkebunan	Sumber daya alam yang mendukung produksi tanaman perkebunan	Anomali iklim
					Harga pasar yang tidak stabil
					Teknik budidaya yang kurang tepat
					Kurangnya minat menjadi petani muda
					Adanya degradasi lahan
		Total Produksi Peternakan	Rendahnya produktivitas peternakan	Ketersediaan bibit unggul dalam meningkatkan produktivitas ternak (populasi dan produksi ternak)	Kurangnya ketersediaan lahan untuk penanaman hijauan pakan ternak
					Banyaknya kejadian PHMS
					Rendahnya mutu genetik hewan
					Kurangnya minat beternak muda
	Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persentase penurunan penanganan kasus penyakit menular	Banyaknya jumlah kasus penyakit hewan menular	Suhu dan kelembaban terjaga	Kondisi iklim yang ekstrem
				Pakan yang bergizi seimbang	Kualitas air dan pakan tidak bersih
				Kebersihan kandang	Sistem Hygiene yang kurang baik

Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang Memengaruhi	
				Pendukung	Penghambat
				dan lingkungan	
				Manajemen beternak yang baik	Perdagangan hewan yang tidak terkontrol
	Meningkatnya Diversifikasi pangan di masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Belum adanya cadangan pangan daerah yang memadai	ketersediaan lahan, infrastruktur pertanian yang memadai, serta dukungan pemerintah dalam penyediaan modal, teknologi, informasi, dan pasar	konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian, dampak perubahan iklim, sebaran produksi yang tidak merata, rendahnya akses terhadap sumber pembiayaan dan teknologi, serta kurangnya diversifikasi pangan

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan

2.2.1 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

Telaah Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Strategis Provinsi Jawa Timur dilaksanakan untuk mengidentifikasi potensi, peluang serta tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan urusan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Telaahan ini mencakup perbandingan sasaran, kondisi eksisting, serta factor internal dan eksternal yang terdapat dalam kedua dokumen dimaksud. Hasil telaahan tersebut digunakan sebagai dasr dalam penyelarasan sasaran dan strategi perangkat daerah dengan arah kebijakan Pembangunan nasional dan provinsi. Rangkuman hasil telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi disajikan pada table dibawah ini:

Tabel 2.6 Pemetaan Telaah Renstra K/L Renstra Provinsi

Sasaran Renstra K/L dan Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan (eksisting)	Internal		Eksternal	
		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Ancaman/ Tantangan	Peluang
Sasaran Renstra K/L					
Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri	Rendahnya produktivitas dibandingkan potensi hasil	Adanya program prioritas daerah untuk sektor pertanian	Keterbatasan fiskal tidak semua sektor pertanian terakomodir	Komoditas pertanian dari luar negeri yang masuk ke Indonesia	Peluang pasar yang terbuka di Indonesia dengan beragam komoditas
	Terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian	Komitmen pimpinan serta jajarannya dalam peningkatan produksi dan produktivitas	Menurunnya kesuburan tanah (lahan) pertanian dan kerusakan infrastruktur jaringan irigasi	Hilangnya mata pencaharian petani	Pertumbuhan ekonomi dan industri
	Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pertanian	Ketersediaan potensi SDM dan SDB dalam	Menurunnya minat generasi muda terhadap	Keterbatasan akses terhadap teknologi dan inovasi pertanian	Pengembangan varietas tanaman baru yang lebih tahan terhadap

Sasaran Renstra K/L dan Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan (eksisting)	Internal		Eksternal	
		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Ancaman/ Tantangan	Peluang
		peningkatan produksi	sektor pertanian		kondisi ekstrem
	Menurunnya daya dukung sumber daya alam dan lingkungan yang mengakibatkan terjadinya degradasi lahan	Ketersediaan dukungan anggaran	Akses petani terhadap teknologi dan informasi pasar terbatas	Peningkatan risiko bencana alam	Peluang investasi di sektor pangan
	Tingginya tingkat kehilangan hasil (losses)		Tingkat kehilangan hasil masih tinggi		
			Penerapan teknologi pertanian terbatas		
	Sering terjadinya anomali iklim		Belum sinerginya pelayanan karena lemahnya koordinasi antar instansi		
	Masih terdapat tingkat kerawanan pangan di daerah		Belum sinerginya pelayanan karena lemahnya koordinasi antar instansi		
Sasaran Renstra Provinsi					
Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Masih terdapat daerah rentan pangan dan tingkat	Beragamnya bahan pangan lokal yang tersedia	Rendahnya minat masyarakat terhadap bahan	Pendistribusian pangan kurang efisien	Potensi diversifikasi pangan

Sasaran Renstra K/L dan Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan (eksisting)	Internal		Eksternal	
		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Ancaman/ Tantangan	Peluang
	ketergantungan terhadap beras sebagai pangan pokok		pangan lokal		
Meningkatnya produksi tanaman pangan prioritas	Pertumbuhan produksi pertanian yang cenderung melambat	Sarana produksi tanaman pangan yang beragam	Kandungan organik tanah yang kurang sehingga ketergantungan terhadap pupuk kimia masih tinggi	Terjadinya fluktuasi harga	Peluang ekspor ke negara lain
Meningkatnya produksi hortikultura prioritas	Masih rendahnya daya saing produksi hortikultura terhadap produk impor	Produk hortikultura memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi	Petani masih belum optimal berbudidaya tanaman hortikultura		

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan

2.2.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Penyusunan dokumen perencanaan strategis yang merupakan dokumen strategis 5 tahunan yang disusun dengan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pamekasan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan 2023-2043. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 2.7 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Krisis Ketersediaan Cadangan Pangan	Kabupaten Pamekasan	Lahan Pertanian produktif	Pemetaan Lahan Pertanian Yang produktif/dilindungi	Pertumbuhan penduduk Kabupaten Pamekasan meningkat sehingga kebutuhan lahan hunian semakin meningkat	Kebutuhan Pangan semakin meningkat memerlukan lahan pertanian yang memadai
Perubahan Iklim Ekstrem			Penentuan masa tanam	Bencana alam Hama dan penyakit tanaman meningkat	Melakukan diversifikasi tanaman Pembangunan infrastruktur irigasi dan penyimpanan hasil panen
Peningkatan Alih Fungsi Lahan			Penurunan produksi pertanian	Adanya alih fungsi lahan Biaya produksi meningkat	Penggunaan teknologi modern Peningkatan kualitas benih dan pupuk

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan

2.2.3 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, tantangan dan peluang Dinas Ketahanan Pangan

dan Pertanian Kabupaten Pamekasan ditinjau dari impikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.8 Faktor Pendorong dan Penghambat ditinjau dari Implikasi KLHS

No	Permasalahan/ Isu Strategis dalam KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
1.	Degradasi Lahan	Menurunnya lahan pertanian produktif	Pemetaan Lahan Pertanian Yang poduktif/Dilindungi	Ketersediaan dalam memenuhi kebutuhan pangan	Potensi diversifikasi pangan
				Alih fungsi lahan untuk pemukiman	Pertumbuhan ekonomi dan industri
2.	Produktivitas pertanian rendah	Menurunnya produksi sektor pertanian dan peternakan	Ketersediaan pangan kabupaten terbatas	Faktor perubahan iklim	Pengembangan varietas tanaman yang tahan kondisi cuaca

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan

2.2.4 Telaah Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPIPD)

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPIPD) merupakan dokumen strategis yang menekankan arah kebijakan penguatan riset, pengembangan inovasi, dan pemanfaatan teknologi di tingkat daerah. Dalam konteks Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, telaah terhadap RIPJPIPD penting karena berkaitan langsung dengan upaya peningkatan daya saing di sektor pertanian, perkebunan dan peternakan. Peningkatan produktivitas pertanian, peningkatan usahatani, integrasi usahatani, percepatan hilirisasi sera diversifikasi pangan akan menghasilkan data potensi yang lebih akurat, meningkatkan efisiensi produksi, serta mendorong lahirnya inovasi berbasis teknologi. Adapun Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPIPD) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:

Tabel 2.9 Telaah Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah

Potensi Unggulan Daerah/Prioritas Permasalahan Daerah	Program	Kegiatan	Indikator
Daya Saing Sektor Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Program Peningkatan produktivitas pertanian		
		Pembentukan pusat pengembangan dan atau percontohan di bidang pertanian	Jumlah pusat pengembangan dan atau percontohan yang dibentuk
		Pengembangan inovasi dan teknologi sarana pertanian	Jumlah inovasi dan teknologi sarana pertanian yang dikembangkan
		Diseminasi hasil riset dan inovasi pada kelompok tani	Jumlah hasil riset di bidang pertanian yang didiseminasikan
		Inkubasi dan pemberdayaan kelompok tani	Jumlah kelompok tani yang diberdayakan
		Pemberian penghargaan pada hasil inovasi di bidang pertanian	Jumlah inovasi yang mendapat penghargaan
		Pengembangan bibit unggulan di sektor pertanian	Jumlah bibit unggul yang dikembangkan
		Pengembangan produk pertanian berorientasi export	Jumlah komoditas pertanian yang di masuk pasar export
	Program Peningkatan ketahanan usaha tani	Pengendalian distribusi barang penting (Sarana Pertanian)	Jumlah sarana pertanian yang diawasi distribusinya
		Pengembangan konsep pertanian sirkular	Rancangan konsep pertanian sirkular Kabupaten Pamekasan pada komoditas unggulan
		Penguatan kelembagaan petani	Dokumen pemetaan dan rencangan penguatan keberdayaan petani
		Pengembangan model bisnis untuk kelompok tani	Jumlah model bisnis yang disusun
		Penyuluhan dan pendampingan usaha pada kelompok tani	% Kelompok tani mendapat penyuluhan dan pendampingan
		Pembentukan kelompok tani unggulan berbasis riset dan inovasi	Jumlah kelompok tani Unggulan

		Mitigasi dan penanganan bencana pertanian	% Bencana pertanian yang berhasil dicegah/ditangani
		Peningkatan nilai tambah hasil pertanian	Jumlah Produk pertanian yang memiliki nilai tambah
	Program integrasi usaha tani		
		Pemenuhan prasarana penunjang usaha tani dan interkoneksi dengan usaha lainnya	% Sarana prasarana penunjang usaha tani dalam kondisi baik
		Fasilitasi temu usaha tani (antar pelaku usaha tani dan atau pelaku idustri turunannya)	Jumlah pelaku usaha yang berpartisipasi
		Pembentukan kelompok tani	Jumlah petani yang tergabung ke dalam kelompok tani
		Penguatan jaringan kerjasama riset dan inovasi dengan Perguruan tinggi di bidang pertanian dan teknologi hasil pertanian	Jumlah MOU Kerjasama dengan perguruan tinggi di bidang pertanian
		Pemetaan jaringan distribusi sarana dan hasil pertanian (Untuk mengurangi beban produksi)	Dokumen pemetaan jaringan distribusi sarana dan hasil pertanian
		Penyelenggaraan event kompetisi inovasi di bidang pertanian	Jumlah inovator yang mengikuti kompetisi inovasi
		Optimalisasi misi dagang pada produk unggulan kabupaten	Jumlah pelaksanaan misi dagang
		Fasilitasi kerjasama internasional untuk produk unggulan	Jumlah kontrak kerjasama
Industri Pengolahan pada komoditas unggulan daerah (tembakau, sapi, dan perikanan)	Percepatan Hilirisasi dan diversifikasi produk turunan komoditas unggulan daerah		
		Pemberian insentif fiskal bagi pelaku usaha di bidang hilirisasi produk unggulan	Jumlah pelaku usaha di bidang produk unggulan mendapatkan insentif fiskal
		Penguatan implementasi kebijakan TKDN dalam proses pembangunan	Rata-rata TKDN dalam pengadaan/ pembangunan

		Pengembangan kawasan dan klaster industri	Jumlah kawasan/klaster industri yang ditetapkan
		Diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku usaha di sektor industri olahan	Jumlah hasil riset dan inovasi yang didesiminasikan
		Pendampingan usaha (transfer teknologi) kepada pelaku usaha di bidang industri pengolahan	Jumlah pendampingan (transfer teknologi) yang dilaksanakan
		Kolaborasi riset pengembangan produk unggulan kabupaten dengan dengan perguruan tinggi	Jumlah kolaborasi riset pada produk unggulan
		Penyelenggaraan pameran inovasi daerah	Jumlah pameran inovasi daerah
		Fasilitasi penetapan HAKI terhadap produk inovasi di bidang industri pengolahan	Jumlah fasilitasi HAKI yang diberikan
		Integrasi pengembangan industri dan riset (Demand Driven Research)	Jumlah demand driven research terhadap produk unggulan yang dilaksanakan
		Mempercepat proses replikasi teknologi di bidang industri pengolahan	Jumlah teknologi yang direplikasi

Sumber: RIPJPIPD Kabupaten Pamekasan

2.2.5 Isu Strategis

Dalam penyelenggaraan urusan bidang pangan dan pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan masih menghadapi sejumlah permasalahan yang berdampak pada optimalisasi kinerja peningkatan produksi hasil pertanian dan ketahanan pangan daerah. Oleh karena itu, visualisasi dalam bentuk pohon masalah akan membantu menggambarkan hubungan sebab akibat dari permasalahan utama, faktor penyebab serta dampaknya terhadap capaian tujuan peningkatan daya saing pertanian daerah di Kabupaten Pamekasan. Pohon masalah digambarkan seperti berikut:

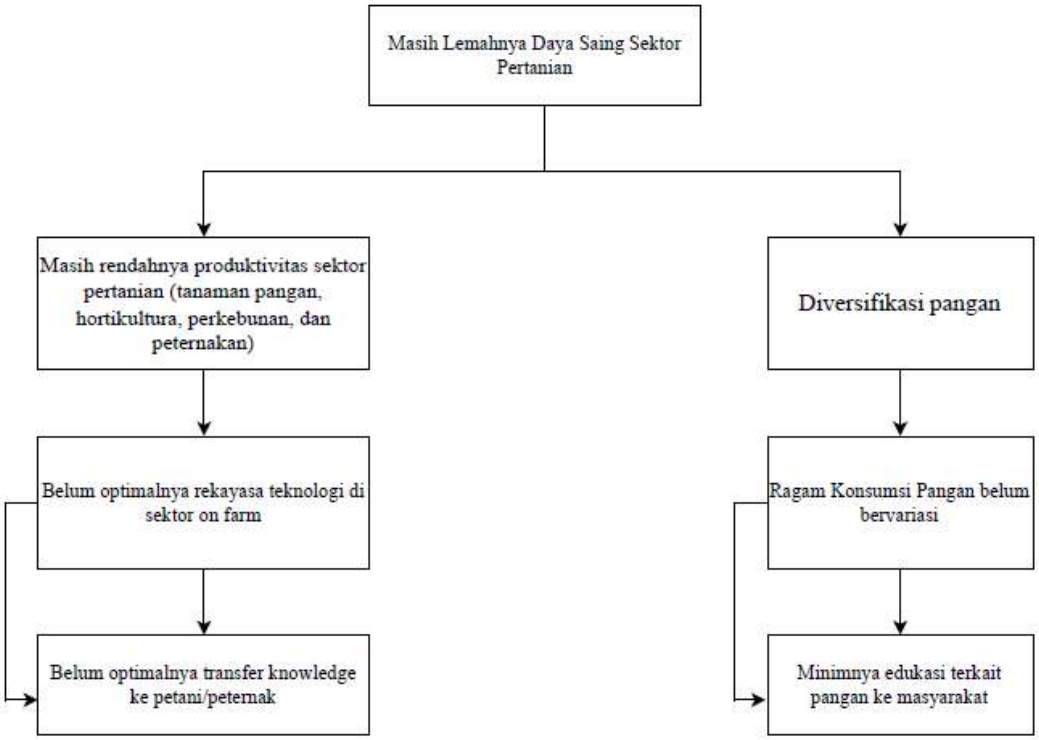

Gambar 2.2 Pohon Masalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya. Isu strategis dapat bersumber dari tingkat daerah, nasional maupun internasional.

Tabel 2.10 Isu Strategis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Produksi dan nilai tambah tanaman pangan dan hortikultura serta ketahanan pangan 2. mendukung pertumbuhan ekonomi	1. Krisis Ketersediaan Cadangan Pangan 2. Rendahnya lahan pertanian yang terlayani jaringan irigasi teknis 3. Penurunan minat pekerja sektor pertanian dan Perkebunan 4. Tingginya biaya produksi komoditas padi, tembakau dan ternak sapi 5. Alih fungsi lahan Krisis 6. Regenerasi	Kesejahteraan petani/peternak	1. Ketahanan pangan dan energi yang menuntut meningkatkan produktivitas tanpa merusak lingkungan serta kualitas dan keamana pangan 2. Dampak perubahan iklim	Urban farming, petani millenial, modernisasi pertanian, dan tingkat pendapatan petani	Kedaulatan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani melalui: 1.menjaga kestabilan stok dan harga 2. Efisiensi produksi (intensifikasi dan penguatan saprodi) 3. Nilai tambah produk pangan	1. Diversifikasi pangan 2. Masih rendahnya produkstivitas sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan)

	petani dan kelembagaannya					

1. Diversifikasi Pangan

Ketidakpastian global yang terjadi saat ini mengakibatkan ancaman krisis pangan yang akan berpengaruh kepada semua negara di dunia. Hingga tahun 2024 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa Indonesia masih mengimpor lima komoditas pangan utama, yaitu beras, daging sapi, bawang putih, jagung, dan gula pasir. Ketergantungan tinggi terhadap impor pangan ini sering kali memicu inflasi dan membebani perekonomian nasional. Untuk itu, upaya pelestarian dan pengembangan pangan lokal perlu diprioritaskan, terutama melalui diversifikasi pangan yang berkelanjutan guna mendukung kemandirian pangan, stabilitas ekonomi, dan ketahanan pangan. Namun, upaya pelestarian dan peningkatan produksi pangan lokal nyatanya bukan hal yang mudah. Kebijakan dan program diversifikasi konsumsi pangan lokal yang telah lama dilaksanakan, belum menunjukkan hasil yang signifikan pada peningkatan konsumsi pangan lokal. Tantangan utamanya meliputi ketersediaan pangan lokal yang terbatas karena kekeringan yang berkepanjangan, harga yang kurang kompetitif, serta mutu produk yang tidak konsisten karena tidak ada standar baku mutu untuk pangan lokal.

2. Masih Rendahnya Produktivitas Sektor Pertanain (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan)

Sektor pertanian merupakan komponen vital dalam struktur perekonomian dengan kontribusi terhadap ketahanan pangan, penyediaan lapangan kerja, serta Pembangunan wilayah pedesaan.Namun demikian, produktivitas sektor pertanian memiliki kecenderungan yang menurun dibeberapa subsektor strategis khususnya pada subsector pangan. Bbeberapa factor utama yang memengaruhi rendahnya produktivitas sektor pertanian khususnya subsector pangan yaitu:

a) Teknologi dan Inovasi yang terbatas
   Sebagian besar petani di Jawa Timur khususnya Kabupaten Pamekasan masih mengandalkan system pertanian tradisonal yang belum sepenuhnya didukung oleh inovasi teknologi modern. Mekanisasi, digitalisasi pertanian, dan penggunaan alsintan belum merata terutama di daerah dengan akses infrastruktur terbatas.
b) Akses sarana produksi dan Permodalan yang terbatas
   Ketersediaan dan keterjangkauan sarana produksi seperti benih unggul, pupuk, pestisida, serta akses terhadap pembiayaan pertanian yang terjangkau masih menjadi tantangan utama. Ketergantungan terhadap system pendistribusian yang tidak efisien menyebabkan biaya produksi menjadi tinggi sehingga margin keuntungan petani mengecil.
c) Perubahan Iklim dan Ketidakpastian musim tanam

Perubahan iklim berdampak terhadap pola tanam dan produktivitas lahan pertanian. Ketidakpastian musim tanam, adanya bencana alam dan serangan OPT mengakibatkan penurunan hasil panen terutama di subsector pangan.

d) Rendahnya Nilai Tambah dan Akses Pasar
Keterbatasan akses pasar modern dan industri pengolahan menyebabkan nilai tambah hasil pertanian tidak optimal serta memperbesar ketergantungan petani pada tengkulak.

BAB 3. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pamekasan dalam bentuk yang yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan tujuan RPJMD Kabupaten Pamekasan yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal, Pengentasan Kemiskinan, dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, sedangkan sasarannya ialah Meningkatnya daya saing sektor unggulan daerah.

Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Bupati Pamekasan dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dengan tujuan yaitu:

“Meningkatnya Daya Saing Pertanian Daerah”

Sektor pertanian memegang peranan penting dalam pembangunan daerah, tidak hanya sebagai penyedia bahan pangan dan lapangan kerja tetapi juga sebagai penggerak ekonomi lokal yang berkelanjutan. Dalam beberapa tahun terakhir terjadi pergeseran orientasi pembangunan daerah dari sekedar peningkatan produksi menuju peningkatan daya saing yang berkelanjutan. Hal ini, sejalan dengan arah kebijakan strategis pemerintahan daerah dalam mendorong kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal. Untuk mencapai tujuan tersebut, telah ditetapkan sasaran sebagai arah pencapaian tujuan yaitu: “Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian dan Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah”. Indikator dalam menunjang sasaran meningkatnya produksi hasil pertanian dalam mencapai tujuan diantaranya peningkatan produksi tanaman pangan (padi dan jagung), hortikultura (bawang merah, cabe merah, cabe rawit, melon, semangka, durian, tanaman biofarmaka dan tanaman hias), Perkebunan (tembakau), dan peternakan (sapi ternak dan unggas) sedangkan indikator meningkatnya ketahanan pangan yaitu persentase daerah rawan pangan yang ditangani. Keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator kinerja serta target capaian indikator kinerja selama periode tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 31 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2025-2029

NSPK	Sasaran RPJMD	Tujuan dan Sasaran	Indikator	Satuan	Base line	Target					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7					
Urusan pertanian		Meningkatnya Daya Saing Pertanian Daerah	PDRB Sektor pertanian dan peternakan	%	20,75	20,80	20,95	21,15	21,25	21,50	21,75
1. Sarana dan Prasarana Pertanian 2. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 3. Perizinan Usaha Pertanian 4. Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya daya saing sektor unggulan daerah	Meningkatnya produksi hasil pertanian	Peningkatan produksi tanaman pangan	%	7	7	7	7	7	7	7
			Peningkatan produksi hortikultura	%	13	13	13	13	13	13	13
			Peningkatan produksi perkebunan	%	41	41	41	41	41	41	41
			Peningkatan produksi komoditas peternakan	%	7	7	7	7	7	7	7
Urusan Pangan											
1. Kedaulatan dan		Meningkatnya ketahanan	Persentase daerah rentan	%	2	2	2	2	2	2	2

NSPK	Sasaran RPJMD	Tujuan dan Sasaran	Indikator	Satuan	Base line	Target					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7					
Kemandirian Pangan 2. Penyelenggaraan Ketahanan Pangan 3. Penanganan Kerawanan Pangan 4. Keamanan Pangan		pangan daerah	rawan pangan								
			Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)	%	14,36	13,86	13,36	12,50	12,05	11,85	11,35
Urusan Penunjang Pemerintahan		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan PD	Nilai SAKIP PD	Poin	80	81	82	83	84	85	86

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan

Dalam penyusunan dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan Tahun 2025–2029, cascading kinerja merupakan instrumen penting yang menjamin adanya keterhubungan logis antara visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja, hingga program dan kegiatan. Dengan demikian, cascading berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan implementasi teknis di tingkat perangkat daerah.

Sebagai penguat keterhubungan antar dokumen perencanaan, berikut ditampilkan visualisasi cascading Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan

Pertanian Kabupaten Pamekasan 2025–2029. Visualisasi ini menunjukkan keterkaitan langsung antara Visi dan Misi Kepala Daerah → Tujuan RPJMD → Tujuan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian → Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian → Indikator Kinerja → Program dan Kegiatan, sebagaimana Gambar 3.1 berikut:

Cascading

TUJUAN	**Meningkatnya Daya Saing Pertanian Daerah**		
INDIKATOR TUJUAN	**PDRB Sektor Pertanian dan Peternakan**		
SASARAN	**Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian**	**Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah**	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan PD**
INDIKATOR SASARAN	✓ **Peningkatan produksi tanaman pangan** ✓ **Peningkatan Produksi Holtikultura** ✓ **Peningkatan Produksi Perkebunan** ✓ **Peningkatan Produksi KomoditasPeternakan**	✓ **Presentase Daerah Rawan Pangan** ✓ **Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)**	**Nilai SAKIP PD**
PROGRAM	• Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian ▪ Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian ▪ Penyuluhan Pertanian ▪ Pengendalian Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner ▪ Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	▪ Penanganan Kerawanan Pangan ▪ Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat ▪ Pengawasan Keamanan Pangan ▪ Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan ▪ Perizinan Usaha Pertanian	▪ Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota
INDIKATOR PROGRAM	▪ Jumlah populasi ternak ▪ Produktivitas pertanian ▪ Persentase rehabilitasi/pembangunan prasarana pertanian ▪ Persentase rehabilitasi/pengembangan prasarana pertanian ▪ Persentase kelompok tani yang beraktivitas ▪ Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis ▪ Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan ▪ Jumlah Petani Penerima Manfaat	▪ Presentase jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota ▪ Skor PPH kabupaten/kota ▪ Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	▪ Capaian nilai sakip
PENGAMPU	❖ Bidang produksi pertanian ❖ Bidang produksi peternakan ❖ Bidang prasarana pertanian ❖ Bidang perizinan dan penyuluhan ❖ Bidang kesehatan hewan	❖ Bidang ketahanan pangan ❖ Bidang perizinan dan penyuluhan	❖ Sekretariat

Gambar 3.1 Cascading Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

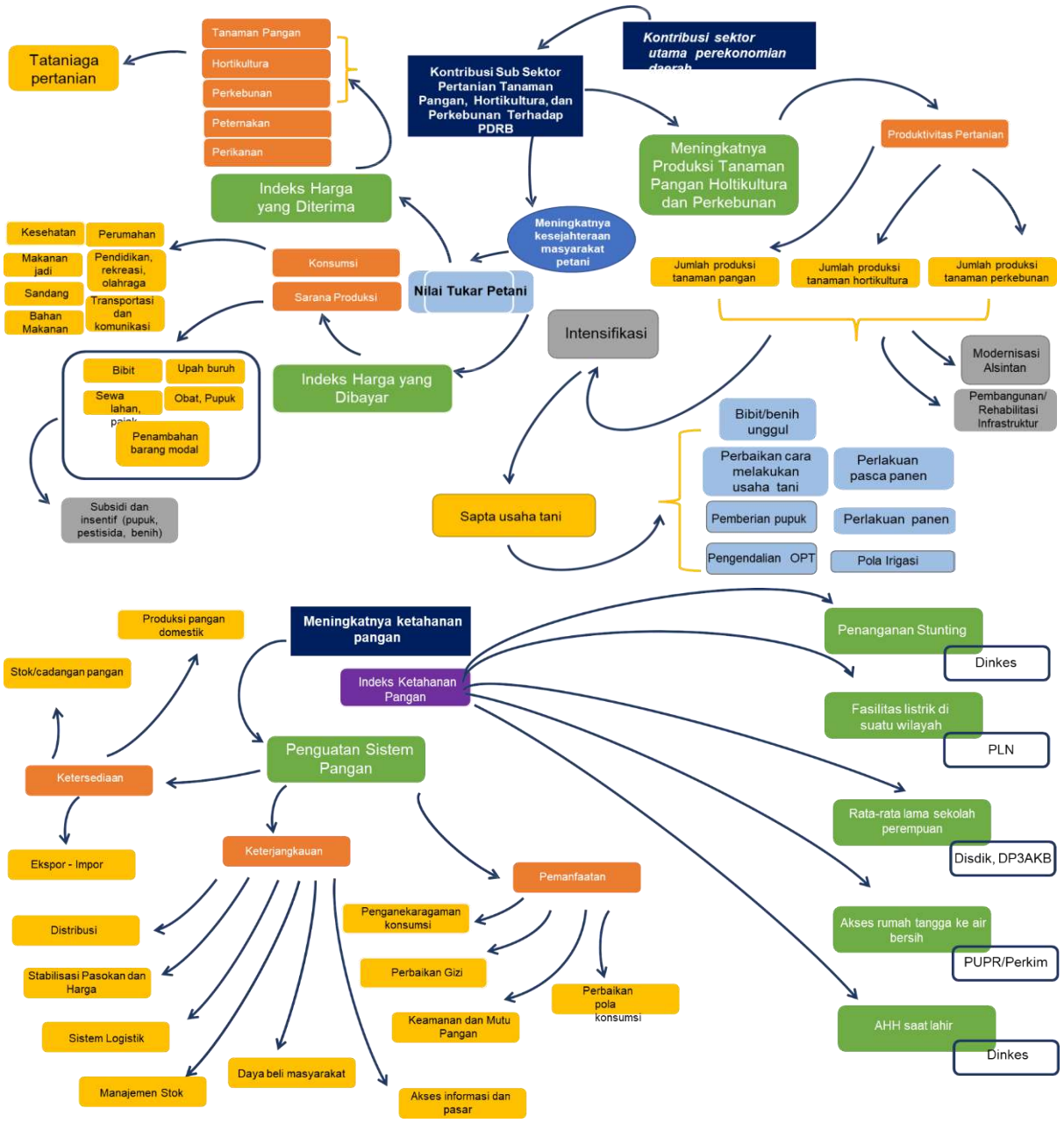

Gambar 3.2 Crosscutting Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena

strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungdan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2025- 2030 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Penyusunan Strategi dan Arah Kebijakan

PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Krisis Ketersediaan Cadangan Pangan 2. Rendahnya lahan pertanian yang terlayani jaringan irigasi teknis 3. Penurunan minat pekerja sektor pertanian dan Perkebunan 4. Tingginya biaya produksi komoditas padi, tembakau dan ternak sapi 5. Alih fungsi lahan	1. Diversifikasi pangan 2. Masih rendahnya produktivitas sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, Perkebunan dan peternakan)	1. Meningkatnya produksi hasil pertanian 2. Meningkatnya ketahanan pangan daerah	1. Melakukan Intensifikasi pertanian dengan menerapkan rekayasa teknologi di bidang pertanian	1. Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global 2. Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis. 3. Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian.

PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
6. Regenerasi petani dan kelembagaannya				4. Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian. 5. Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian 6. Mengembangkan klaster ekonomi berbasis inovasi lokal pada sektor-sektor unggulan daerah 7. Mendorong terbentuknya klaster inovasi strategis untuk memperkuat daya saing sektor pertanian dan Perkebunan 8. Memperkuat tata Kelola usaha, regulasi, dan infrastruktur terpadu untuk meningkatkan kepastian usaha dan daya saing

PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				daerah sektor pertanian 9. Memperkuat sektor pertanian, perdagangan, dan UMKM melalui evaluasi kebijakan, digitalisasi layanan, serta kolaborasi dagang lintas skala 10. Memperkuat sektor pertanian dan Perkebunan melalui evaluasi kebijakan dan optimalisasi infrastruktur penunjang

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis Pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran Pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Adapun tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

SASARAN RPJMD: Meningkatnya Daya Saing Sektor Unggulan Daerah			
Tujuan PD	**Sasaran PD**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatnya daya saing pertanian daerah	1. Meningkatnya produksi hasil pertanian	Melakukan Intensifikasi pertanian dengan menerapkan	1. Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat

SASARAN RPJMD: Meningkatnya Daya Saing Sektor Unggulan Daerah			
Tujuan PD	**Sasaran PD**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
	2. Meningkatnya ketahanan pangan daerah	rekayasa teknologi di bidang pertanian	berpotensi masuk pasar ekspor/global 2. Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis. 3. Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian. 4. Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian. 5. Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian 6. Mengembangkan klaster ekonomi berbasis inovasi lokal pada sektor-sektor unggulan daerah 7. Mendorong terbentuknya klaster inovasi strategis untuk memperkuat daya saing sektor pertanian dan Perkebunan 8. Memperkuat tata Kelola usaha, regulasi, dan infrastruktur terpadu untuk meningkatkan kepastian usaha dan daya saing daerah sektor pertanian 9. Memperkuat sektor pertanian, perdagangan, dan UMKM melalui evaluasi

SASARAN RPJMD: Meningkatnya Daya Saing Sektor Unggulan Daerah			
Tujuan PD	**Sasaran PD**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
			kebijakan, digitalisasi layanan, serta kolaborasi dagang lintas skala 10. Memperkuat sektor pertanian dan Perkebunan melalui evaluasi kebijakan dan optimalisasi infrastruktur penunjang

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan

Linearitas Operasionalisasi NSPK, Arah kebijakan RPJMD dengan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan adalah upaya menyelaraskan antara arah kebijakan RPJMD dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Linearitas Operasionalisasi NSPK dan arah kebijakan RPJMD dengan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Pentahapan Arah Kebijakan RPJMD yang Terkait Renstra PD				
				2026	2027	2028	2029	2030
1.	Pengawasan penggunaan sarana pertanian	Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global	Pemberian sarana produksi pertanian	✓	✓	✓		
2.	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis	Budidaya Pertanian ramah lingkungan (organik)		✓	✓	✓	✓
3.	Pemberian modal sektor pertanian dan peternakan	Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian	Akses pembiayaan pertanian		✓	✓	✓	✓
4.	Pengembangan prasarana pertanian	Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya	Peningkatan infrastruktur sektor pertanian (irigasi, jalan usaha tani, RPH,Puskeswan)	✓	✓	✓		

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Pentahapan Arah Kebijakan RPJMD yang Terkait Renstra PD				
				2026	2027	2028	2029	2030
		saing produk pertanian						
5.	Pengembangan Kelompok/Kelembagaan tingkat Desa	Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian	Meningkatkan kelembagaan petani ke sektor agribisnis		✓	✓	✓	✓
6.	Pengembangan komoditi unggulan	Mengembangkan klaster ekonomi berbasis inovasi lokal pada sektor-sektor unggulan daerah	Pemetaan potensi desa	✓	✓	✓		
7.	Pendampingan intensif pada kelompok tani untuk meningkatkan usahatani	Mendorong terbentuknya klaster inovasi strategis untuk memperkuat daya saing sektor pertanian dan Perkebunan	Peningkatan akses terhadap sarana dan prasarana produksi pertanian, serta pengolahan pasca panen	✓	✓	✓	✓	
8.	Kolaborasi kemitraan dengan pelaku usaha	Memperkuat tata Kelola usaha, regulasi, dan infrastruktur terpadu untuk	Memberikan perlindungan usaha petani dari risiko pasar, iklim dan pembiayaan	✓	✓	✓		

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Pentahapan Arah Kebijakan RPJMD yang Terkait Renstra PD				
				2026	2027	2028	2029	2030
		meningkatkan kepastian usaha dan daya saing daerah sektor pertanian						
9.	Mendorong transformasi hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah	Memperkuat sektor pertanian, perdagangan, dan UMKM melalui evaluasi kebijakan, digitalisasi layanan, serta kolaborasi dagang lintas skala	meningkatkan kesejahteraan petani melalui integrasi usaha tani melalui pemberian NIB		✓	✓	✓	✓
10.	Kolaborasi kelembagaan di sektor pertanian	Memperkuat sektor pertanian dan Perkebunan melalui evaluasi kebijakan dan optimalisasi infrastruktur penunjang	Mengadakan kolaborasi secara tematik antar sektor dan desa		✓	✓	✓	✓

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan tema pembangunan tahunan Kabupaten Pamekasan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2030, maka tema pembangunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan untuk setiap tahapan tahun 2026-2030 dirumuskan sebagai berikut:

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026	2027	2028	2029	2030
Memperkuat sektor pertanian dengan	Memperkuat infrastruktur pertanian	Berkolaborasi dengan elemen masyarakat dan dunia	Mengembangkan sektor pertanian dari pra dan pasca panen	Meningkatkan produksi di sektor unggulan

rekayasa teknologi	dan peternakan	akademis untuk pembangunan pertanian		

Sumber: Dinas Ketahanan Pamngan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan

Arah kebijakan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan Tahun 2025–2029 perlu dijabarkan secara tahunan agar implementasinya lebih terukur. Pentahapan ini dilakukan untuk menentukan kapan sebuah kebijakan mulai dijalankan, berapa lama berlanjut, serta prioritas pelaksanaan setiap tahunnya. Dengan demikian, dokumen Renstra dapat menjadi pedoman yang jelas bagi penyusunan program dan kegiatan tahunan pada Renja Perangkat Daerah, sebagaimana tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5 Matriks Arah Kebijakan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan

No	Arah Kebijakan	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Pemberian sarana produksi pertanian	✓	✓	✓		
2.	Budidaya Pertanian ramah lingkungan (organik)		✓	✓	✓	✓
3.	Akses pembiayaan pertanian		✓	✓	✓	✓
4.	Peningkatan infrastruktur sektor pertanian (irigasi, jalan usaha tani, RPH,Puskeswan)	✓	✓	✓		
5.	Meningkatkan kelembagaan petani ke sektor agribisnis		✓	✓	✓	✓
6.	Pemetaan potensi desa	✓	✓	✓		
7.	Peningkatan akses terhadap sarana dan prasarana produksi pertanian, serta pengolahan pasca panen	✓	✓	✓	✓	
8.	Memberikan perlindungan usaha petani dari risiko pasar, iklim dan pembiayaan	✓	✓	✓		
9.	meningkatkan kesejahteraan petani melalui integrasi usaha tani melalui pemberian NIB		✓	✓	✓	✓
10.	Mengadakan kolaborasi secara tematik antar sektor dan desa		✓	✓	✓	✓

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan

Integrasi janji politik Adalah proses memasukkan janji-janji atau komitmen politik kepala daerah terpilih yang telah diterjemahkan menjadi tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang terukur, selaras, terpadu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Adapun tujuannya adalah:

1. Menjadi bagian resmi dari arah pembangunan daerah;
2. Dapat diimplementasikan melalui program kerja pemerintah daerah.
3. Memiliki indikator kinerja, target, dan dukungan anggaran yang jelas.

Berikut penterjemahan dan integrasi janji politik Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan:

Tabel 3.6 Integrasi Janji Politik

No	Program Politis	Program Nomenklatur	Kegiatan	Sub Kegiatan	Bidang/ Unit Kerja
1.	Asuransi Pertanian	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Bidang Produksi pertanian
2.	Pembangunan jalan usaha tani	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Bidang Prasarana Pertanian
3.	Pembangunan jaringan irigasi tersier	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Bidang Prasarana Pertanian

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan

BAB 4. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN SASARAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan. Program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil *(outcome)* sebuah program dan hasil *(output)* kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan.

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
Peningkatan Nilai tambah sektor pertanian, perikanan, dan peternakan	Meningkatnya Daya Saing Pertanian Daerah				PDRB Sektor pertanian dan peternakan		
		Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian			Peningkatan Produksi Tanaman Pangan		
					Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura		
					Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan		
					Peningkatan Produksi Hasil Peternakan		
			Meningkatnya Populasi Ternak		**Jumlah Populasi Ternak**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	
				Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Penyediaa	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan**	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak	n dan Peredaran Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten	**Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten /Kota**	
						Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	JANJI POLITIK
						Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	
						Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	
				Tersedianya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan	Jumlah SDG Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dikelola	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten /Kota**	
						Peningkatan Kualitas SDG	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
						Hewan/Tanaman	
				Terawasinya Poultry shop/ toko obat hewan	Jumlah Poultry Shop/Toko Obat Hewan yang Diawasi	**Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer**	
						Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	
			Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian		**Produktivitas Pertanian**		
				Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	
						Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
						Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya Pembangunan Prasarana Pertanian		**Persentase rehabilitasi/pembangunan prasarana pertanian**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	
				Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah panjang prasarana pertanian yang dubangun	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	
						Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	JANJI POLITIK
						Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
						Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
						Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
						Potong Hewan	
			Meningkatnya Pengembangan Prasarana Pertanian		**Persentase rehabilitasi/pengembangan prasarana pertanian**		
				Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dikembangkan	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	
						Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	
			Kelompok tani dapat meningkat aktivitas usahanya		**Persentase kelompok tani yang**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
					beraktivitas		
				Terlaksananya Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani yang naik kelas	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	
						Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	
						Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
						Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/ Kota	
			Meningkatnya cakupan layanan kesehatan hewan		**Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (Diperole**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT**	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
					h dari Surveylance Penyakit dari 5 PHMS)	**VETERINER**	
				Terlaksananya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten /Kota**	
						Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
						Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan Dan Zoonosis Pada Hewan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah data pengeluaran dan pemasukan HPM ke Wilayah Kabupaten Pamekasan	**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten /Kota**	
						Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	
				Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Hewan	Jumlah data pelayanan kesehatan hewan	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam**	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
						Daerah Kabupaten /Kota	
						Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	
				Terlaksanya Pengawasan Bahan Pangan Asal Hewan (BPAH) dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Kurban	Jumlah Data Pengawasan Peredaran Bahan Pangan Asal Hewan di Pasar Tradisional dan Data Pemeriksaan Kesehatan Hewan Kurban	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	
						Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	
			Berkurangnya gangguan OPT		**Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian/Pemberian asuransi petani	Jumlah petani penerima manfaat	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten /Kota**	
						Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	JANJI POLITIK
		Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Berkurangnya Desa/Kelurahan Rawan Pangan		**Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota**		
					Prosentase daerah rentan rawan pangan yang dikendalikan	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	
				Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah desa yang mendapatkan penanganan rawan pangan	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan**	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
						Kabupaten /Kota	
						Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	JANJI POLITIK
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/ Kota	
			Terjaganya Pola Pangan Masyarakat		**Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten/Kota**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	
				Tercapainya Target PPH Konsumsi Pangan	Jumlah pelaporan capaian target konsumsi pangan	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/**	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
					sesuai AKG	**Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	
						Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
				Terlaksananya Pasar Tani Murah (Pasar Tani Galak)	Tersediannya dan tersalurkannya sumber pangan pokok dan pangan	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten /Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	
						Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
				Terlaksananya Pencapaian Target Konsums	Skor Pola Pangan Harapan	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi**	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
				i Pangan Perkapita /Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		**Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	
			Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan		**Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan**	**PROGRAM PENANGANAN KEAMANAN PANGAN**	
				Terlaksananya Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Jumlah pangan segar yang aman	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten /Kota**	
						Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
						Kabupaten/ Kota	
						Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	
			Meningkatnya infrastruktur kemandirian pangan		**Persentase infrastruktur kemandirian pangan yang direhab/dibangun**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	
				Tersedianya infrastruktur pendukung kemandirian pangan	Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang dibangun	**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota**	
						Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	
						Penyediaan Infrastruktur	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
						Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	
			Persentase izin usaha pertanian yang sesuai standar pelayanan		**Persentase izin usaha pertanian yang ber NIB**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	
				Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Terbit	**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten /Kota**	
						Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	
			Meningkatnya Nilai SAKIP		**Capaian Nilai SAKIP**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evalusi Kinerja	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah adminstrasi umum yang terpenuhi	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	
						Penyediaan Bahan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
						Logistik Kantor	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa pemeliharaan Barang Milik Daerah	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
						Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan

Selanjutnya Rencana program/kegiatan/sub kegiatan dan pendanaan adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam suatu organisasi, Dengan memiliki rencana program/kegiatan/sub kegiatan dan pendanaan yang jelas, organisasi dapat:

1. Mengelola sumber daya: Mengalokasikan sumber daya keuangan dan non-keuangan secara efektif.
2. Mengukur kinerja: Mengevaluasi keberhasilan program, kegiatan, dan sub kegiatan.
3. Mengambil keputusan: Mengambil keputusan yang tepat dan strategis dalam mengelola program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(15)*
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				675.000.000,00		690.000.000,00		898.447.700,00		1.025.000.000,00		1.072.253.449,00	
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN				225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00	
Meningkatnya infrastruktur kemandirian pangan	Persentase Infrastruktur Kemandirian Pangan Yang Sesuai Peruntukannya (Persentase)	0	1	225.000.000,00	1	225.000.000,00	1	225.000.000,00	1	225.000.000,00	1	225.000.000,00	
2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00	
Tersedianya infrastruktur pendukung kemandirian pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	-	1	225.000.000,00	1	225.000.000,00	1	225.000.000,00	1	225.000.000,00	1	225.000.000,00	
	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia (unit)	1	1		1		1		1		1		
2.09.02.2.01.0003 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(15)*
Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	-	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
2.09.02.2.01.0006 - Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00	
Tersedianya Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia (unit)	1	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00	
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				225.000.000,00		240.000.000,00		250.000.000,00		325.000.000,00		350.000.000,00	
Terjaganya pola pangan masyarakat	Nilai PPH (Nilai)	71	72,70	225.000.000,00	72,70	240.000.000,00	72,70	250.000.000,00	72,70	325.000.000,00	72,70	350.000.000,00	
2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00	
Terlaksananya Pasar Tani Murah (Pasar Tani Galak)	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)	1	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(15)*
2.09.03.2.01.0002 - Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00	
Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)	1	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	
2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				165.000.000,00		180.000.000,00		190.000.000,00		265.000.000,00		290.000.000,00	
Terlaksananya Pencapaian Target AKG	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	4	5	165.000.000,00	5	180.000.000,00	5	190.000.000,00	5	265.000.000,00	5	290.000.000,00	
	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				150.000.000,00		165.000.000,00		175.000.000,00		250.000.000,00		275.000.000,00	
Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	4	5	150.000.000,00	5	165.000.000,00	5	175.000.000,00	5	250.000.000,00	5	275.000.000,00	
2.09.03.2.04.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan													

BIDANG URUSAN/PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(15)*
dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi konsumsi Per Kapita Per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)	1	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				185.000.000,00		185.000.000,00		383.447.700,00		435.000.000,00		457.253.449,00	
Berkurangnya desa/kelurahan rawan pangan	Penyediaan cadangan pangan pemerintah (%)	9	10	185.000.000,00	10	185.000.000,00	10	383.447.700,00	10	435.000.000,00	10	457.253.449,00	
2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota				185.000.000,00		185.000.000,00		383.447.700,00		435.000.000,00		457.253.449,00	
Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	-	1	185.000.000,00	1	185.000.000,00	1	383.447.700,00	1	435.000.000,00	1	457.253.449,00	
	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
2.09.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup				150.000.000,00		150.000.000,00		348.447.700,00		400.000.000,00		422.253.449,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(15)*
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota													
Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	348.447.700,00	1	400.000.000,00	1	422.253.449,00	
2.09.04.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	-	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	20	20	40.000.000,00	20	40.000.000,00	20	40.000.000,00	20	40.000.000,00	20	40.000.000,00	
2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(15)*
Terlaksananya Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	
	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
2.09.05.2.01.0004 - Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	
Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	
2.09.05.2.01.0007 - Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				36.695.906.951,00		37.054.616.021,00		37.223.614.481,00		37.478.282.803,00		37.816.062.181,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(15)*
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				18.991.768.651,00		19.049.768.651,00		19.059.923.881,00		19.071.923.881,00		19.073.923.881,00	
3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00	
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evalusi Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	60.000.000,00	2	60.000.000,00	2	60.000.000,00	2	60.000.000,00	2	60.000.000,00	
3.27.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	60.000.000,00	2	60.000.000,00	2	60.000.000,00	2	60.000.000,00	2	60.000.000,00	
3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				17.033.768.651,00		17.078.768.651,00		17.078.923.881,00		17.078.923.881,00		17.078.923.881,00	
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	172	173	17.033.768.651,00	173	17.078.768.651,00	175	17.078.923.881,00	175	17.078.923.881,00	175	17.078.923.881,00	
3.27.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				17.033.768.651,00		17.078.768.651,00		17.078.923.881,00		17.078.923.881,00		17.078.923.881,00	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	172	173	17.033.768.651,00	173	17.078.768.651,00	175	17.078.923.881,00	175	17.078.923.881,00	175	17.078.923.881,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(15)*
	Tunjangan ASN (Orang/bulan)												
3.27.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				40.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00	
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	15	15	40.000.000,00	16	50.000.000,00	17	60.000.000,00	18	70.000.000,00	18	70.000.000,00	
3.27.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				40.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	15	15	40.000.000,00	16	50.000.000,00	17	60.000.000,00	18	70.000.000,00	18	70.000.000,00	
3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				65.000.000,00		68.000.000,00		68.000.000,00		70.000.000,00		72.000.000,00	
Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	65.000.000,00	1	68.000.000,00	1	68.000.000,00	1	70.000.000,00	1	72.000.000,00	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN/PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(15)*
3.27.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				25.000.000,00		28.000.000,00		28.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	25.000.000,00	1	28.000.000,00	1	28.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	
3.27.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		42.000.000,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	42.000.000,00	
3.27.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.618.000.000,00		1.618.000.000,00		1.618.000.000,00		1.618.000.000,00		1.618.000.000,00	
Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	1.618.000.000,00	1	1.618.000.000,00	1	1.618.000.000,00	1	1.618.000.000,00	1	1.618.000.000,00	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
3.27.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	1	1	18.000.000,00	1	18.000.000,00	1	18.000.000,00	1	18.000.000,00	1	18.000.000,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)												
3.27.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.600.000.000,00		1.600.000.000,00		1.600.000.000,00		1.600.000.000,00		1.600.000.000,00	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	1.600.000.000,00	1	1.600.000.000,00	1	1.600.000.000,00	1	1.600.000.000,00	1	1.600.000.000,00	
3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	175.000.000,00	1	175.000.000,00	1	175.000.000,00	1	175.000.000,00	1	175.000.000,00	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	2		2		2		2		2		
3.27.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(15)*
3.27.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				8.018.096.000,00		8.018.096.000,00		8.019.648.300,00		8.127.316.622,00		8.138.096.000,00	
Meningkatnya Populasi Ternak	Jumlah Populasi Ternak (Ekor)	180.077	180.277	908.096.000,00	180.277	908.096.000,00	180.277	909.648.300,00	180.277	1.017.316.622,00	180.277	1.028.096.000,00	
3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				85.000.000,00		85.000.000,00		86.552.300,00		114.220.622,00		125.000.000,00	
Tersedianya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	1	1	85.000.000,00	1	85.000.000,00	1	86.552.300,00	1	114.220.622,00	1	125.000.000,00	
3.27.02.2.02.0002 - Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				85.000.000,00		85.000.000,00		86.552.300,00		114.220.622,00		125.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	1	1	85.000.000,00	1	85.000.000,00	1	86.552.300,00	1	114.220.622,00	1	125.000.000,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(15)*
3.27.02.2.04 - Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Terawasinya Poultry shop/ toko obat hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar (Laporan)	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	
3.27.02.2.04.0001 - Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Terperiksanya Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar (Laporan)	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	
3.27.02.2.05 - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota				798.096.000,00		798.096.000,00		798.096.000,00		878.096.000,00		878.096.000,00	
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar (Laporan)	1	1	798.096.000,00	1	798.096.000,00	1	798.096.000,00	1	878.096.000,00	1	878.096.000,00	
	Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN/PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(15)*
3.27.02.2.05.0002 - Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak				80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00	
Terlaksananya Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak (Dokumen)	1	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	
3.27.02.2.05.0006 - Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan				120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
Terawasinya Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan (Laporan)	1	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	
3.27.02.2.05.0008 - Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak				598.096.000,00		598.096.000,00		598.096.000,00		598.096.000,00		598.096.000,00	
Terjaminnya peredaran benih/bibit ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar (Laporan)	1	1	598.096.000,00	1	598.096.000,00	1	598.096.000,00	1	598.096.000,00	1	598.096.000,00	
Meningkatnya Produktivitas sektor pertanian	Produktivitas sektor pertanian (ton/ha) (Ton/Ha)	425	445	7.110.000.000,00	455	7.110.000.000,00	465	7.110.000.000,00	475	7.110.000.000,00	485	7.110.000.000,00	
3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				7.110.000.000,00		7.110.000.000,00		7.110.000.000,00		7.110.000.000,00		7.110.000.000,00	
Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	1	1	7.110.000.000,00	1	7.110.000.000,00	1	7.110.000.000,00	1	7.110.000.000,00	1	7.110.000.000,00	
	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana												

BIDANG URUSAN/PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(15)*
	Pendukung Pertanian (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi				6.100.000.000,00		6.100.000.000,00		6.100.000.000,00		6.100.000.000,00		6.100.000.000,00	
Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	1	1	6.100.000.000,00	1	6.100.000.000,00	1	6.100.000.000,00	1	6.100.000.000,00	1	6.100.000.000,00	
3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1.010.000.000,00		1.010.000.000,00		1.010.000.000,00		1.010.000.000,00		1.010.000.000,00	
Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	1	1	1.010.000.000,00	1	1.010.000.000,00	1	1.010.000.000,00	1	1.010.000.000,00	1	1.010.000.000,00	
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				8.200.000.000,00		8.397.709.070,00		8.400.000.000,00		8.400.000.000,00		8.600.000.000,00	
Meningkatnya pembangunan prasarana pertanian	Jumlah panjang prasarana pertanian yang dibangun (Meter)	16.550	16.550	5.100.000.000,00	16.550	5.200.000.000,00	16.550	5.200.000.000,00	16.550	5.200.000.000,00	16.550	5.500.000.000,00	
3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian				5.100.000.000,00		5.200.000.000,00		5.200.000.000,00		5.200.000.000,00		5.500.000.000,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(15)*
Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	1	1	5.100.000.000,00	1	5.200.000.000,00	1	5.200.000.000,00	1	5.200.000.000,00	1	5.500.000.000,00	
	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	35	35		35		35		35		35		
	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	9	15		15		15		15		15		
	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	45	45		45		45		45		45		
3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani				1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	35	35	1.000.000.000,00	35	1.000.000.000,00	35	1.000.000.000,00	35	1.000.000.000,00	35	1.000.000.000,00	
3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya				1.800.000.000,00		1.800.000.000,00		1.800.000.000,00		1.800.000.000,00		1.800.000.000,00	
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	45	45	1.800.000.000,00	45	1.800.000.000,00	45	1.800.000.000,00	45	1.800.000.000,00	45	1.800.000.000,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(15)*
3.27.03.2.02.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani				2.100.000.000,00		2.100.000.000,00		2.100.000.000,00		2.100.000.000,00		2.400.000.000,00	
terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	9	15	2.100.000.000,00	15	2.100.000.000,00	15	2.100.000.000,00	15	2.100.000.000,00	15	2.400.000.000,00	
3.27.03.2.02.0015 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan				200.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	
Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya rumah potong hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	1	1	200.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	
Meningkatnya pengembangan prasarana pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dikembangkan (Unit)	2	2	3.100.000.000,00	2	3.197.709.070,00	2	3.200.000.000,00	2	3.200.000.000,00	2	3.100.000.000,00	
3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian				3.100.000.000,00		3.197.709.070,00		3.200.000.000,00		3.200.000.000,00		3.100.000.000,00	
Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	0	1	3.100.000.000,00	1	3.197.709.070,00	1	3.200.000.000,00	1	3.200.000.000,00	1	3.100.000.000,00	
	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan												

BIDANG URUSAN/PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(15)*
	Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	0	1	3.000.000.000,00	1	3.000.000.000,00	1	3.000.000.000,00	1	3.000.000.000,00	1	3.000.000.000,00	
3.27.03.2.01.0015 - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota				100.000.000,00		197.709.070,00		200.000.000,00		200.000.000,00		100.000.000,00	
Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	1	1	100.000.000,00	1	197.709.070,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	100.000.000,00	
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				425.000.000,00		525.000.000,00		680.000.000,00		815.000.000,00		940.000.000,00	
	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (												

BIDANG URUSAN/PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(15)*
Meningkatnya cakupan layanan kesehatan hewan	diperoleh dari surveilens penyakit dari 5 PHMS) (%)	40	43	425.000.000,00	44	525.000.000,00	45	680.000.000,00	46	815.000.000,00	50	940.000.000,00	
3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota				125.000.000,00		160.000.000,00		245.000.000,00		315.000.000,00		340.000.000,00	
Terlaksananya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	1	1	125.000.000,00	1	160.000.000,00	1	245.000.000,00	1	315.000.000,00	1	340.000.000,00	
	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	0	1		1		1		1		1		
3.27.04.2.01.0005 - Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan				50.000.000,00		75.000.000,00		150.000.000,00		160.000.000,00		180.000.000,00	
Terlaksananya surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	0	1	50.000.000,00	1	75.000.000,00	1	150.000.000,00	1	160.000.000,00	1	180.000.000,00	
3.27.04.2.01.0008 - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				75.000.000,00		85.000.000,00		95.000.000,00		155.000.000,00		160.000.000,00	
	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami												

BIDANG URUSAN/PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(15)*
Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	1	1	75.000.000,00	1	85.000.000,00	1	95.000.000,00	1	155.000.000,00	1	160.000.000,00	
3.27.04.2.02 - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota				75.000.000,00		100.000.000,00		125.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00	
Terlaksananya pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM (Laporan)	1	1	75.000.000,00	1	100.000.000,00	1	125.000.000,00	1	150.000.000,00	1	200.000.000,00	
3.27.04.2.02.0006 - Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM				75.000.000,00		100.000.000,00		125.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00	
Terawasi dan terperiksanya kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM (Laporan)	1	1	75.000.000,00	1	100.000.000,00	1	125.000.000,00	1	150.000.000,00	1	200.000.000,00	
3.27.04.2.03 - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota				150.000.000,00		175.000.000,00		200.000.000,00		225.000.000,00		250.000.000,00	
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	1	1	150.000.000,00	1	175.000.000,00	1	200.000.000,00	1	225.000.000,00	1	250.000.000,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(15)*
3.27.04.2.03.0002 - Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner				150.000.000,00		175.000.000,00		200.000.000,00		225.000.000,00		250.000.000,00	
Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	1	1	150.000.000,00	1	175.000.000,00	1	200.000.000,00	1	225.000.000,00	1	250.000.000,00	
3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner				75.000.000,00		90.000.000,00		110.000.000,00		125.000.000,00		150.000.000,00	
Terlaksananya Pengawasan Bahan Pangan Asal Hewan (BPAH) dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Kurban	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik (Unit Usaha)	5	5	75.000.000,00	5	90.000.000,00	5	110.000.000,00	5	125.000.000,00	5	150.000.000,00	
3.27.04.2.04.0010 - Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan				75.000.000,00		90.000.000,00		110.000.000,00		125.000.000,00		150.000.000,00	
Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik (Unit Usaha)	5	5	75.000.000,00	5	90.000.000,00	5	110.000.000,00	5	125.000.000,00	5	150.000.000,00	
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	
Berkurangnya gangguan OPT	Jumlah petani penerima manfaat (Petani)	0	50	250.000.000,00	50	250.000.000,00	50	250.000.000,00	50	250.000.000,00	50	250.000.000,00	
	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman												

BIDANG URUSAN/PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(15)*
	pangan, holtikultura dan perkebunan (%)	116	136		146		156		166		176		
3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	
Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian/Pemberian asuransi petani	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	116	136	250.000.000,00	146	250.000.000,00	156	250.000.000,00	166	250.000.000,00	176	250.000.000,00	
3.27.05.2.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	
Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	116	136	250.000.000,00	146	250.000.000,00	156	250.000.000,00	166	250.000.000,00	176	250.000.000,00	
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				35.000.000,00		38.000.000,00		38.000.000,00		38.000.000,00		38.000.000,00	
Fasilitasi perizinan usaha pertanian sesuai standar pelayanan	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Terbit (Dokumen)	1	1	35.000.000,00	1	38.000.000,00	1	38.000.000,00	1	38.000.000,00	1	38.000.000,00	
3.27.06.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan													

BIDANG URUSAN/PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(15)*
Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				35.000.000,00		38.000.000,00		38.000.000,00		38.000.000,00		38.000.000,00	
Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	1	1	35.000.000,00	1	38.000.000,00	1	38.000.000,00	1	38.000.000,00	1	38.000.000,00	
3.27.06.2.01.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian				35.000.000,00		38.000.000,00		38.000.000,00		38.000.000,00		38.000.000,00	
Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	1	1	35.000.000,00	1	38.000.000,00	1	38.000.000,00	1	38.000.000,00	1	38.000.000,00	
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				776.042.300,00		776.042.300,00		776.042.300,00		776.042.300,00		776.042.300,00	
Meningkatnya kapasitas Kelompok Tani	Persentase kelompok tani yang naik kelas (%)	39	39	776.042.300,00	39	776.042.300,00	39	776.042.300,00	39	776.042.300,00	39	776.042.300,00	
3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				776.042.300,00		776.042.300,00		776.042.300,00		776.042.300,00		776.042.300,00	
Terlaksananya Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	13	13	776.042.300,00	13	776.042.300,00	13	776.042.300,00	13	776.042.300,00	13	776.042.300,00	
	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	13	13		13		13		13		13		

BIDANG URUSAN/PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(15)*
	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	13	13		13		13		13		13		
3.27.07.2.01.0001 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa				531.042.300,00		531.042.300,00		531.042.300,00		531.042.300,00		531.042.300,00	
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	13	13	531.042.300,00	13	531.042.300,00	13	531.042.300,00	13	531.042.300,00	13	531.042.300,00	
3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	13	13	30.000.000,00	13	30.000.000,00	13	30.000.000,00	13	30.000.000,00	13	30.000.000,00	
3.27.07.2.01.0005 - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota				215.000.000,00		215.000.000,00		215.000.000,00		215.000.000,00		215.000.000,00	
Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	13	13	215.000.000,00	13	215.000.000,00	13	215.000.000,00	13	215.000.000,00	13	215.000.000,00	

Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang dianggap paling penting dan harus dilakukan terlebih dahulu karena dampaknya yang signifikan terhadap tujuan dan sasaran organisasi. Dengan menentukan kegiatan prioritas, organisasi dapat:

1. Mengalokasikan sumber daya secara efektif: Mengalokasikan sumber daya yang terbatas pada kegiatan yang paling penting.
2. Meningkatkan efisiensi: Meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan fokus pada kegiatan yang paling penting.
3. Mencapai tujuan: Mencapai tujuan dan sasaran organisasi dengan lebih efektif.

Sub Kegiatan Prioritas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:

Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5
1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian			
		Meningkatnya Populasi Ternak		
			Pengendalian Dan Pengawasan Penyediaan Dan Peredaran Benih/Bibit	
			Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	
2.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian			
		Meningkatnya Pembangunan Prasarana Pertanian		
			Pembangunan Prasarana Pertanian	
			Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha	
3.	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana			
		Berkurangnya Gangguan OPT		
			Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan	

			(OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan	
4.	Program Penanganan Kerawanan Pangan			
		Berkurangnya Desa/Kelurahan Rawan Pangan		
			Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, Dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Yang Mencakup Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD.

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tujuan:									
1.	PDRB Sektor pertanian dan peternakan	%	20,75	20,95	21,15	21,25	21,50	21,75	
Sasaran:									
1.	Peningkatan produksi tanaman pangan	%	7	7	7	7	7	7	
2.	Peningkatan produksi tanaman hortikultura	%	13	13	13	13	13	13	
3.	Peningkatan produksi tanaman perkebunan	%	41	41	41	41	41	41	
4.	Peningkatan produksi peternakan	%	7	7	7	7	7	7	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Persentase daerah rentan rawan pangan	%	2	2	2	2	2	2	
6.	Prevalensi Ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*)	%	13,86	13,36	12,50	12,05	11,85	11,35	
7.	Nilai SAKIP PD	Poin	81	82	83	84	85	86	

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan

Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah digunakan untuk menilai kinerja keberhasilan pemerintahan daerah baik secara keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan yang menjadi kewenangan daerah. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan mengampu urusan pertanian diantanya:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	%	10	10	10	10	10	10	
2.	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten/Kota	Poin	71.45	71.65	71.85	71.95	72.15	72.45	
3.	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	2	2	2	2	2	2	
4.	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi	%	20	20	20	20	20	20	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan								
5.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	7	7	7	7	7	7	
6.	Peningkatan Produksi Hortikultura	%	13	13	13	13	13	13	
7.	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	%	7	7	7	7	7	7	
8.	Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan	%	41	41	41	41	41	41	
9.	Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	%	42	43	44	45	46	50	
10.	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (Diperoleh dari Surveylance Penyakit dari 5 PHMS)	%	21	22	23	24	25	26	

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan

BAB 5. PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan berlaku selama lima tahun yaitu dari tahun 2025 hingga 2029. Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Pamekasan berfungsi untuk menjabarkan Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

5.1 Pedoman Transisi

Dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029 menjadi panduan dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (RENJA) untuk tahun 2026 hingga tahun 2030. Setelah berakhirnya RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029, perlu disusun Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan Tahun 2030-2034 sebagai pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun berikutnya. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah pedoman bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2030. Pedoman penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2030 akan mendasarkan pada RPJPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2045, amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2045 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2030.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029 ini merupakan panduan dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karenanya konsistensi antara perencanaan dan implementasinya. Untuk memastikan hal tersebut, maka diperlukan pedoman pelaksanaan yang dalam hal ini

dimuat dalam kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pamekasan. Berikut merupakan Kaidah pelaksanaan RPJMD yang dimaksud:

a. Bupati Kabupaten Pamekasan berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029 kepada masyarakat;
b. Penyusunan RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029;
c. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029;
d. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
e. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Pamekasan agar segera menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029 paska penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029 ini;
f. Penyusunan RPJMD ini telah dilakukan melalui konsultasi publik, dengan harapan program-program yang tertuang dalam RPJMD sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penjaringan aspirasi melalui konsultasi publik tersebut dapat meningkatkan peran serta para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) selaku institusi yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah, bertugas untuk melakukan fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
g. Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029;
h. DPRD berkewajiban membahas KUA-PPAS yang diajukan oleh Bupati dalam rangka penyusunan RAPBD dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang RAPBD untuk menjamin agar sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018

tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

i. Beberapa hal mengenai perubahan dari RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029 yang bersifat tidak fundamental cukup ditindak lanjuti melalui Peraturan Bupati, hal tersebut meliputi perubahan target kinerja, perubahan nomenklatur perangkat daerah, dan hal-hal lain yang bersifat tidak merubah substansi terkait perencanaan pembangunan Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029.

5.3 Penutup

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2025-2029 diharapkan dapat menjadi salah satu pedoman dan juga acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan konstribusi optimal bagi pencapaian tujuan dan sasaran Kabupaten Pamekasan.

Pamekasan, Oktober 2025
Plt.Kepala Dinas Ketahanan Pangan
dan Pertanian Kabupaten Pamekasan

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Ir. Indah Kurnia Sulistiorini, S.Pt., M.M
Pembina
NIP. 19711217 199803 2 006

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1.POHON KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

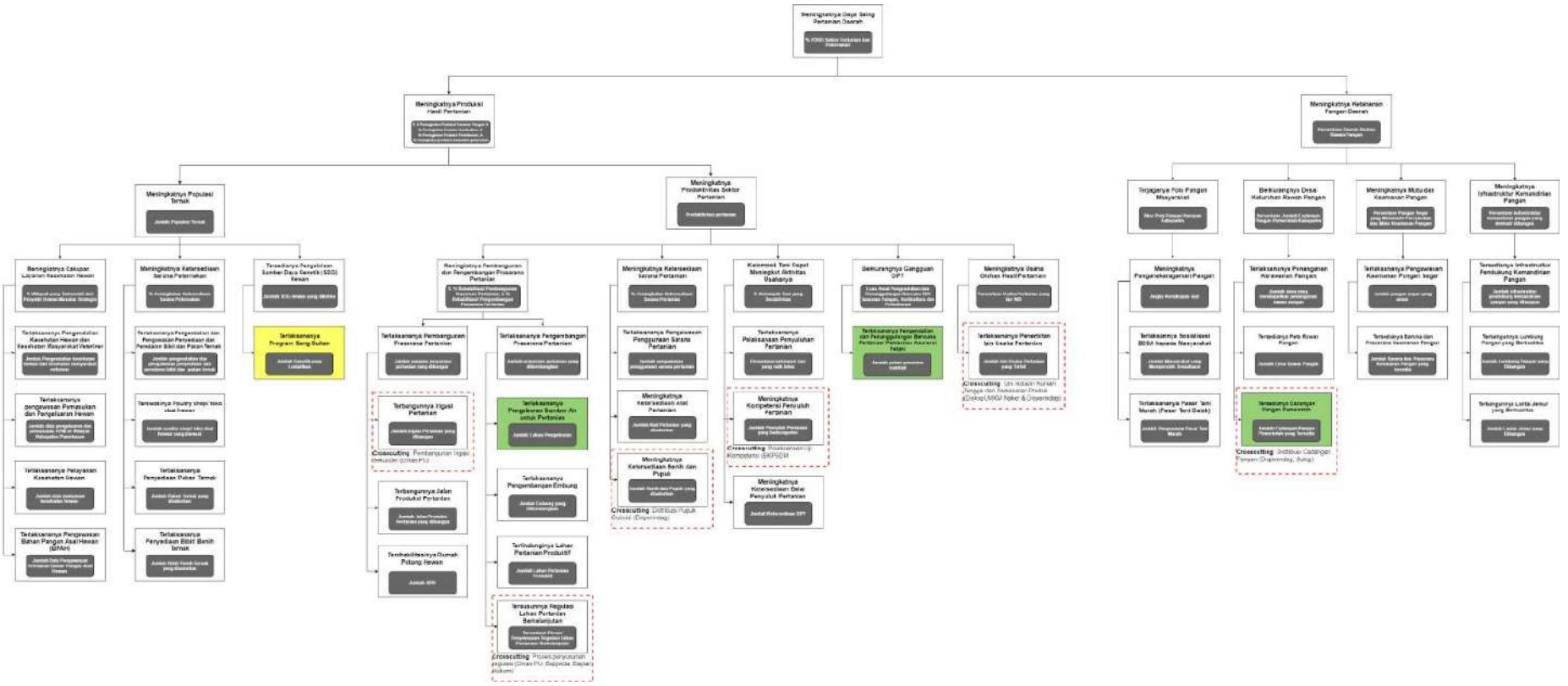

LAMPIRAN 2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

No	Kinerja Utama		Definisi Operasional	Formula	Sumber Data
	Tujuan/Sasaran	IKU			
1.	**Meningkatnya daya saing pertanian daerah**	PDRB Sektor pertanian dan peternakan	Nilai tambah total dari semua unit produksi di sektor pertanian dan peternakan di Kabupaten Pamekasan yang meliputi (sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan)	$PDRB = \sum(Output\ Sektor\ Pertanian\ x\ Harga\ Dasar) - \sum(Input\ Antara)$	BPS
1.1	Meningkatnya produksi hasil pertanian	Peningkatan produksi tanaman pangan (%)	Peningkatan hasil panen dari berbagai tanaman pangan dalam periode waktu tertentu	$\%\ peningkatan = \frac{(Total\ Produksi\ tahun\ n) - (Total\ produksi\ n-1)}{Total\ Produksi\ n-1}\ x\ 100$	DKPP
		Peningkatan produksi hortikultura (%)	Peningkatan hasil panen dari berbagai tanaman hortikultura dalam periode waktu tertentu	$\%\ peningkatan = \frac{(Total\ Produksi\ tahun\ n) - (Total\ produksi\ n-1)}{Total\ Produksi\ n-1}\ x\ 100$	DKPP

No	Kinerja Utama		Definisi Operasional	Formula	Sumber Data
	Tujuan/Sasaran	IKU			
		Peningkatan produksi perkebunan (%)	Peningkatan hasil panen dari berbagai tanaman perkebunan dalam periode waktu tertentu	$\%\ peningkatan = \frac{(Total\ Produksi\ tahun\ n)\ -\ (Total\ produksi\ n-1)}{Total\ Produksi\ n-1}\ x\ 100$	DKPP
		Peningkatan produksi komoditas peternakan (%)	Peningkatan hasil produksi dari sektor peternakan dalam periode waktu tertentu	$\%\ peningkatan = \frac{(Total\ Produksi\ tahun\ n)\ -\ (Total\ produksi\ n-1)}{Total\ Produksi\ n-1}\ x\ 100$	DKPP
1.2	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Persentase daerah rentan rawan pangan (%)	Daerah yang kondisi ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan fisiologis standar	$\%\ peningkatan = \frac{\left(\begin{matrix}Daerah\ rentan\ pangan\\ yang\ tertangani\ tahun\ n\end{matrix}\right)\ -\ (Daerah\ rentan\ pangan\ yang\ tertangani\ n-1)}{Daerah\ rentan\ pangan\ yang\ tertangani\ \ n-1}\ x\ 100$	DKPP

<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th colspan="2">Kinerja Utama</th><th rowspan="2">Definisi Operasional</th><th rowspan="2">Formula</th><th rowspan="2">Sumber Data</th></tr>
<tr><th>Tujuan/Sasaran</th><th>IKU</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevelence of Undernourishment)</td><td>Proporsi konsumsi sehari-hari masyarakat yang tidak mencukupi untuk memenuhi Tingkat kebutuhan energi yang diperlukan</td><td>$PoU = (2100 - N_t) \times 100$</td><td>DKPP</td></tr>
<tr><td>1.3</td><td>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan PD</td><td>Nilai SAKIP PD</td><td>Nilai SAKIP Adalah sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah meliputi 4 kriteria utama yaitu:</td><td>Penilaian akan menghasilkan nilai antara 0-100 dengan interpretasi positif A. Nilai SAKIP diklasifikasikan kedalam 7 predikat sebagai berikut:
<table>
<tr><th>Predikat</th><th>Nilai Absolut</th><th>Interpretasi</th></tr>
<tr><td>AA</td><td>>90-100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr>
<tr><td>A</td><td>>80-90</td><td>Memuaskan</td></tr>
<tr><td>BB</td><td>>70-80</td><td>Sangat Baik</td></tr>
<tr><td>B</td><td>>60-70</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup (Memadai)</td></tr>
<tr><td>C</td><td>>30-50</td><td>Kurang</td></tr>
<tr><td>D</td><td>>0-30</td><td>Sangat Kurang</td></tr>
</table></td><td>DKPP</td></tr>
</table>

No	Kinerja Utama		Definisi Operasional	Formula	Sumber Data
	Tujuan/Sasaran	IKU			
			1. Perencanaan kinerja (30%) 2. Pengukuran Kinerja (30%) 3. Pelaporan Kinerja (15%) 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)		

LAMPIRAN 3 DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL PROGRAM/KEGIATAN

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

No	Program/Kegiatan	Indikator	Definisi Operasional	Sumber Data
1.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten/Kota	Angka yang mengukur kualitas dan keragaman konsumsi pangan masyarakat	DKPP
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tersedianya dan tersalurkannya sumber pangan pokok dan pangan	Peengadaan pangan untuk daerah rawan pangan, bencana dan rumah tangga miskin	DKPP
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Tercapainya Angka Kecukupan Gizi (AKG)	Kegiatan untuk mengukur standar kebutuhan rata-rata zat gizi harian yang dibutuhkan oleh individu	DKPP
2.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Sebagai salah satu indikator kinerja pemerintah daerah terkait ketersediaan cadangan pangan kabupaten	DKPP

No	Program/Kegiatan	Indikator	Definisi Operasional	Sumber Data
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang mendapatkan penanganan rawan pangan	Rumah tangga miskin di desa yang menerima bantuan pangan sesuai dengan peta rawan pangan	DKPP
3.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Untuk mengukur keamanan pangan segar yang ada di pasar/masyarakat agar diketahui kualitasnya	DKPP
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pangan segar yang aman	Kegiatan monitoring dan pengambilam sample di pasar untuk mengetahui kandungan pestisida di sayuran	DKPP
4.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Capaian Nilai SAKIP PD	Serangkaian kegiatan yang bersifat administratif dan mendukung kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Program ini mencakup penyelenggaraan dukungan manajemen, tata kelola kelembagaan, ketatalaksanaan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, serta urusan umum lainnya yang menunjang keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan substantif perangkat daerah.	DKPP

No	Program/Kegiatan	Indikator	Definisi Operasional	Sumber Data
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	Kegiatan yang bertujuan memastikan keselarasan antara rencana, pelaksanaan, dan hasil kinerja perangkat daerah melalui proses penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, pemantauan, serta evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan. Kegiatan ini mencakup penyusunan dokumen strategis seperti Renstra, Renja, RKA/DPA, serta penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) dan evaluasi internal	DKPP
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	Seluruh proses pengelolaan keuangan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban anggaran Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efisien dan akuntabel	DKPP

No	Program/Kegiatan	Indikator	Definisi Operasional	Sumber Data
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	Seluruh proses pengelolaan data, dokumen, dan kegiatan yang berkaitan dengan manajemen aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan perangkat daerah, meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan, penilaian kinerja, serta pembinaan dan kesejahteraan pegawai.	DKPP
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah adminstrasi umum yang terpenuhi	Seluruh proses penyelenggaraan kegiatan tata usaha dan layanan perkantoran yang mencakup pengelolaan surat-menyurat, kearsipan, kehumasan, rumah tangga kantor, serta pelayanan administratif lainnya yang mendukung kelancaran operasional perangkat daerah.	DKPP

No	Program/Kegiatan	Indikator	Definisi Operasional	Sumber Data
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan berbagai jasa operasional dan teknis yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, baik dalam aspek administratif, teknis, maupun operasional. Jasa penunjang ini dapat meliputi layanan kebersihan, keamanan, pemeliharaan, konsumsi, transportasi, dokumentasi, teknologi informasi, dan jasa profesional lainnya	DKPP
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kegiatan yang dilakukan untuk menjaga dan memastikan agar barang milik daerah — seperti gedung, kendaraan dinas, peralatan kantor, dan infrastruktur pendukung lainnya — tetap dalam kondisi baik, berfungsi optimal, serta memiliki umur pakai yang panjang. Kegiatan ini dilaksanakan secara berkala maupun insidental, meliputi perawatan ringan, perbaikan, hingga penggantian komponen yang rusak	DKPP

No	Program/Kegiatan	Indikator	Definisi Operasional	Sumber Data
5.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah populasi ternak dan produktivitas pertanian	Program untuk memfasilitasi saran pertanian maupun peternakan yang diberikan kepada masyarakat/petani/poktan	DKPP
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pertanian	Kegiatan untuk mengawasi bantuan sarana pertanian yang disalurkan kepada poktan	DKPP
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDG Hewan, tumbuhan dan mikroorganisme yang dikelola	Peningkatan kualitas SDG Hewan/Tanaman adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan mutu genetik sapi Madura khususnya yang ada di wilayah sumber bibit. Bentuk kegiatannya adalah bimbingan teknis kepada peternak sapi bibit, pemilik sapi pemacek dan kelompok pembibit sapi Madura	DKPP
	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Jumlah poultry shop/toko obat hewan yang diawasi	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer adalah kegiatan berupa pembinaan dan pengawasan pemeriksaan mutu, khasiat, dan keamanan peredaran obat hewan dengan output jumlah poultryshop yang mendapat pembinaan dan pengawasan obat hewan	DKPP

No	Program/Kegiatan	Indikator	Definisi Operasional	Sumber Data
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam daerah kabupaten	Bentuk kegiatan berupa fasilitasi peningkatan pelayanan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan massal pada sapi dengan melengkapi sarana pelayanan berupa peralatan IB, penanaman dan pemeliharaan kebun hijauan pakan ternak, pendataan populasi ternak serta pembinaan wilayah sumber bibit melalui village breeding center sapi madura yang berupa bimbingan teknis, pelaksanaan uji performan seleksi/penjaringan ternak sapi betina dan pemacek unggul serta penerbitan surat keterangan layak bibit	DKPP
6.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase rehabilitasi/pembangunan prasarana pertanian dan Persentase rehabilitasi/pengembangan prasarana pertanian	Program untuk peningkatan infrastruktur di sektor pertanian	DKPP
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian	Kegiatan untuk mengembangkan infrastruktur sektor pertanian	DKPP
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah panjang prasarana pertanian yang dIbangun	Kegiatan untuk membangun infrastruktur sektor pertanian (JUT, irigasi, RPH)	DKPP
7.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penanganan Penyakit Hewan	Program ini untuk mengukur efektifitas respon terhadap wabah penyakit misalnya persentasi kasus yang ditangani dan mengukur efektifitas pengobatan dan layanan yang di berikan kepada hewan yang sakit.	DKPP

No	Program/Kegiatan	Indikator	Definisi Operasional	Sumber Data
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Kegiatan penjaminan kesehatan hewan dilakukan untuk memastikan kesehatan hewan melalui pemeriksaan, vaksinasi dan pengobatan untuk mencegah penyebaran penyakit. Penutupan dan pembukaan daerah wabah dilakukan atas rekomendasi dari POV berdasarkan hasil surveilans, analisis risiko dan pemantauan ketat yang dilakukan oleh tim kesehatan hewan	DKPP
	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data pengeluaran dan pemasukan HPM ke Wilayah Kabupaten Pamekasan	Kegiatan ini mencakup : a. Pemeriksaan dokumen b. Identifikasi hewan c. Pemeriksaan fisik hewan d. Pemeriksaan laboratorium bila diperlukan. Pemeriksaan dokumen berupa SV yang diterbitkan oleh POV daerah asal, SKKH oleh dokter hewan berwenang daerah asal serta rekom pemasukan dari daerah tujuan.	DKPP
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data pelayanan kesehatan hewan	Kegiatan ini mencakup pemeriksaan sampel, fisik dan klinis untuk mendukung diagnosa, menentukan pengobatan dan penanganan serta memberikan konsultasi dan edukasi untuk meningkatkan kesehatan hewan dan masyaratkan serta meningkatkan kesejahteraan hewan	DKPP

No	Program/Kegiatan	Indikator	Definisi Operasional	Sumber Data
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Data Pengawasan Peredaran Bahan Pangan Asal Hewan di Pasar Tradisional dan Data Pemeriksaan Kesehatan Hewan Kurban	Kegiatan ini mencakup pengawasan terhadap produk asal hewan yang ASUH untuk dikonsumsi masyarakat, pemeriksaan laboratorium kesmavet untuk menentukan kelayan produk hewan serta KIE untuk penerapan higiene dan sanitasi di tempat usaha peternakan dan produk hewan.	DKPP
8.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan Jumlah Petani Penerima Manfaat	Program untuk mengendalikan luasan penanggulangan bencana di sektor pertanian	DKPP
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah petani penerima manfaat	Kegiatan untuk mengendalikan serangan OPT tanaman pangan dengan metode pemberdayaan petani dan gerdal secara bersamaan	DKPP
9.	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Prosentase penerbitan izin usaha pertanian	Program unutk memfasilitasi pendapatan NIB usaha sektor pertanian	DKPP
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Terbit	Kegaiatan yang membantu usaha di sektor pertanian agar mendapatkan izin berusaha sesuai regulasi	DKPP
10.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang beraktivitas	Program untuk memberdayakan penyuluhan di kelompok tani secara berkala dan berkelanjutan	DKPP

No	Program/Kegiatan	Indikator	Definisi Operasional	Sumber Data
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani yang naik kelas	Kegiatan untuk melakukan penyuluhan aghar dapat meningkatkan kapasitas petani maupun poktan agar berkembang	DKPP

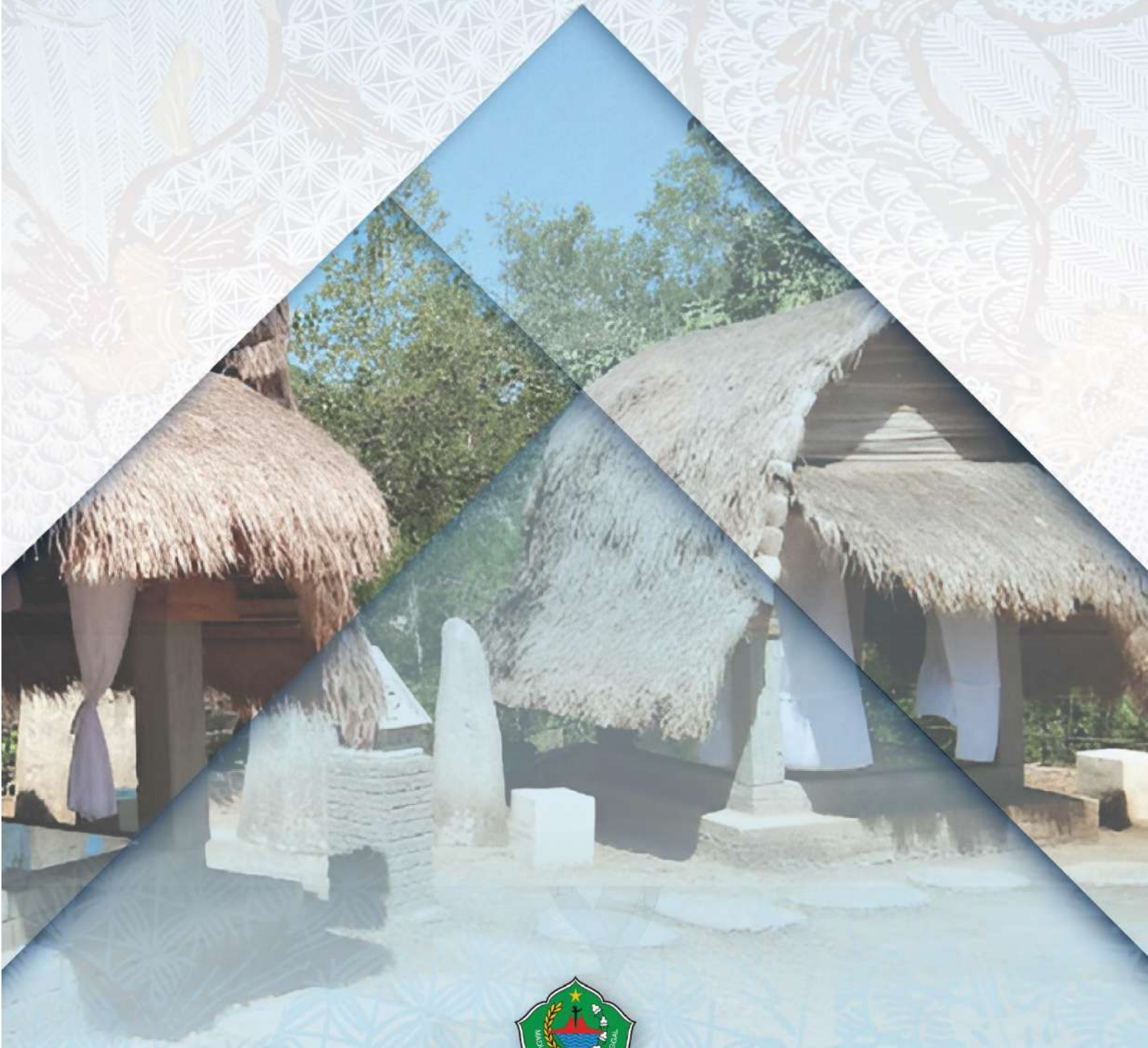

KABUPATEN PAMEKASAN

TAHUN 2025 - 2029